

PENELITIAN MELIBATKAN MAHASISWA



**REVOLUSI KEMERDEKAAN DI SUMATERA
ABAD XX**

Oleh:

Prof. Dr. Husain Haikal

Mudji Hartono, M.Hum

Ita Mutiara Dewi, M.Si.

Arganata P. Laksana

Sri Widyanti

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2013

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN MELIBATKAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2013

1. Judul Penelitian : Revolusi Kemerdekaan Di Sumatera Abad XX
2. KetuaPeneliti
 - a. Nama : Prof. Dr. Husain Haikal
 - b. NIP/NIDN : 194409091970101001 / 0009094401
 - c. Pangkat/Jabatan : Pembina Utama IV/e / Guru Besar
 - d. Jurusan/Prodi : Pendidikan Sejarah / Ilmu Sejarah
 - e. Alamat Rumah : Jl. Sukoharjo DP 134, Dsn Gejayan RT 07/RW 31 Condong Catur Yogyakarta
 No HP : 081328625276
 e-mail : h_haikal2005@yahoo.com
3. Bidang Keilmuan : Ilmu Sejarah
4. Anggota Peneliti

No	Nama & Gelar	NIP	Jabatan	Bidang Keahlian
1	Prof. Dr. Husain Haikal	194409091970101001	Guru Besar	Sejarah Indonesia Sejarah Sosial Ekonomi
2	Mudji Hartono, M.Hum	195501151984031001	Lektor Kepala	Sejarah Indonesia Sejarah Sosial Ekonomi
3	Ita Mutiara Dewi, M.Si.	198103212003122001	Lektor	Sejarah Sosial Politik

5. Mahasiswa yang terlibat

No	Nama Mahasiswa	NIM	Prodi/Jurusan
1	Arganata P. Laksana	06407141002	Ilmu Sejarah / Pendidikan Sejarah
2	Sri Widyanti	09407141023	Ilmu Sejarah / Pendidikan Sejarah

6. Lokasi Penelitian : Sumatera
7. Biaya kegiatan yang diusulkan : Rp. 10.000.000,00
8. Jangka Waktu Pelaksanaan: 6 bulan

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Pend. Sejarah

Yogyakarta, 15 November 2013
 Peneliti,

M. Nurrohman, M.Pd
 NIP.

Prof. Dr. Husain Haikal
 NIP.

Mengetahui:
 Dekan FIS UNY

Prof. Dr. Ajat Sudrajat
 NIP. 196203211989031001

BAB I

PENDAHULUAN

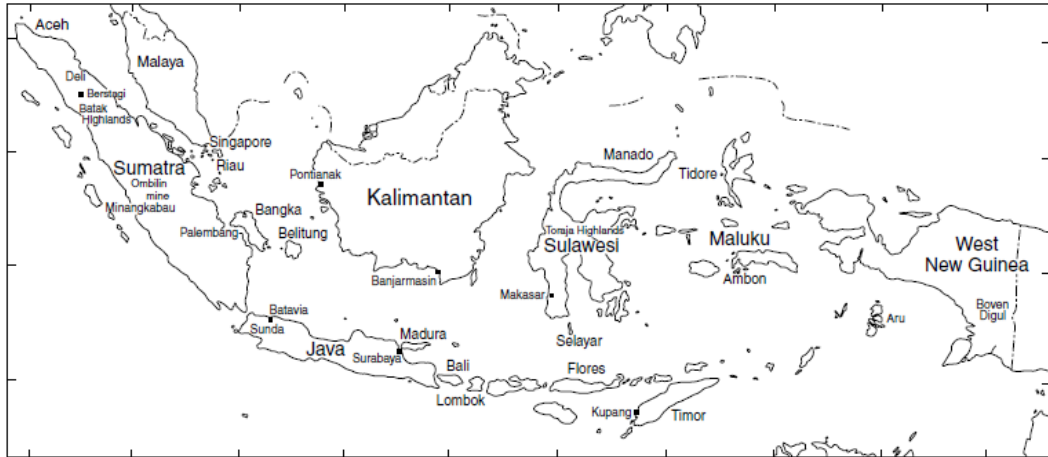
A. Latar Belakang Masalah

Suatu wilayah tentunya selalu mengalami dinamika dan perkembangan dengan adanya berbagai peristiwa penting termasuk revolusi. Salah satu momen penting yang menyebabkan revolusi yaitu kolonialisme Belanda yang mendapatkan perlawanan dari penduduk setempat yang berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan. Revolusi tersebut telah membuahkan hasil yaitu kemerdekaan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Revolusi ternyata belum berakhir, perjuangan Indonesia masih berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda maupun perjuangan diplomatik untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan secara *de facto* dan *de jure*, sehingga tahun 1945 – 1949 sering disebut sebagai masa revolusi kemerdekaan atau revolusi fisik.

Berbagai pulau yang ada di Indonesia memiliki nilai strategis yang menyebabkan kedatangan penjajah termasuk di Sumatra. Sumatra memiliki arti penting hingga sekarang terutama sebagai tempat penghasil pertanian melalui perkebunan. Sumatra pernah dikenal sebagai *Svarnadvipa of Gold Island* yang bermakna pulau yang menghasilkan banyak emas, selain itu Sumatra merupakan pusat perdagangan rempah-rempah¹ sehingga para penjajah seperti Portugis, Belanda dan Inggris berusaha datang ke Sumatra. Belanda pernah berkuasa kurang lebih 350 tahun di Indonesia termasuk Sumatra. Peta wilayah kekuasaan Hindia Belanda dapat diamati pada gambar 1. Wilayah Sumatra antara lain meliputi Aceh, Deli, Brastagi, Minangkabau, Palembang.

¹ Arti penting Sumatra terutama di masa kolonial yang memiliki berbagai potensi terutama bidang agraria dapat diamati salah satunya dalam karya William Marsden, (1811). *History of Sumatra* 3rd ed. London: Black-Horse Court and Longman

Gambar 1. Peta Wilayah Kekuasaan Hindia Belanda



Sumber: Vickers, 2005 : 8

The Dutch venture into full-blown empire-building began with the strong and independent Muslim sultanate of Aceh. Aceh, on the vast and promising island of Sumatra, is known today as a centre of bitter conflict and rebellion. Its name also dripped blood in the nineteenth century. The French, British and Dutch were all trying to consolidate their holdings in Southeast Asia, and were interested in the natural wealth that Aceh had to offer, particularly pepper and oil. In 1873 the Dutch invaded Aceh, little realising that it would take thirty years to complete the takeover.²

17 Maret 1824, Britania dan Belanda menandatangani Perjanjian London dan membagi Hindia Belanda di antara mereka sendiri. Belanda mengklaim Sumatra, Jawa, Maluku, Irian Jaya, dan lain-lain. Britania mengklaim Malaya dan Singapura, dan mempertahankan kepentingannya di Borneo Utara. Aceh diharapkan akan tetap independen. Berbagai peristiwa perlawanan terhadap penjajahan Belanda muncul di abad XIX antara lain Perang Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau, Perang Aceh (1873 – 1903), Perang Batak yang dipimpin Sisingamangaraja XII, Perang Mentawai (peta perang perjuangan melawan penjajah Belanda dapat diamati pada gambar 2), perang Palembang, Jambi dan sebagainya.

Invasi Jepang di Asia Timur dan Tenggara tak dapat diduga bahkan mampu menundukkan kekuasaan Barat. Setelah Singapura jatuh ditangan militer

² Adrian Vickers (2005). *A History of Modern Indonesia*.

Jepang, maka kedudukan pemerintahan Hindia Belanda tak dapat dipertahankan lagi. Serbuan tentara Jepang di Indonesia pada permulaan bulan Maret tahun 1942, dimana pada waktu itu berhadapan dengan armada laut Belanda di lautan Jawa, ternyata Belanda tidak mampu mempertahankan pemerintahan Hindia Belanda dan ia dipaksa menyerah pada tanggal 8 Maret 1942. Syarat-syarat penyerahan itu diumumkan oleh Komando Angkatan Darat Jepang di lapangan terbang Kalijati dekat Bandung, pada waktu itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir yang bernama Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer yang ditawan Jepang sekaligus pertanda berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.

Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.

Kedatangan Sekutu yang berniat melucuti senjata tentara Jepang yang ternyata ditunggangi oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration), membuat Kemerdekaan Indonesia terancam. Pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan republik dan berniat menanamkan kembali kekuasaannya atas Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berjudul **“Revolusi Kemerdekaan di Sumatera pada Abad XX”** yang berfokus pada perjuangan kemerdekaan melawan Belanda serta dampak revolusi kemerdekaan.

B. Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan tetap berada pada lingkup yang sesuai serta selalu terarah, diperlukan beberapa pertanyaan yang membatasi masalah ini, sehingga dapat dicapai solusi yang tepat pada pokok permasalahan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah ini adalah:

1. Apakah makna revolusi kemerdekaan di Sumatera pada abad XX?
2. Bagaimana berjalannya perjuangan revolusi kemerdekaan di Sumatera pada abad XX?
3. Bagaimana perubahan provinsi Sumatera dengan adanya revolusi kemerdekaan di Sumatera pada abad XX?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, analitis serta objektif sesuai dengan metodologi dalam mengkaji proses terjadinya suatu peristiwa sehingga dapat memahami segala nilai yang terkandung di dalamnya
- b. Menerapkan metode penelitian sejarah dan historiografi
- c. Menambah referensi sejarah tentang revolusi di Sumatera khususnya Sumatera Selatan dan Jambi

2. Tujuan Khusus

- a. Mengkaji makna revolusi kemerdekaan di Sumatera pada abad XX
- b. Mengkaji tentang peristiwa revolusi kemerdekaan di Sumatera pada abad XX
- c. Mengkaji dampak revolusi di Sumatera pada abad XX

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai tolak ukur kemampuan penulis dalam meneliti, menganalisa, membaca sumber-sumber sejarah dan merekonstruksinya sebagai karya sejarah.
- b. Memberikan kontribusi untuk perkembangan sejarah lokal di Indonesia.

2. Bagi Pembaca

- a. Menambah pengetahuan bagi pembaca tentang makna revolusi kemerdekaan di Sumatera
- b. Menambah pengetahuan bagi pembaca tentang peristiwa sejarah revolusi kemerdekaan di Sumatera
- c. Memberi gambaran tentang keadaan Sumatera setelah revolusi kemerdekaan

I. TINJAUAN PUSTAKA

a. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memiliki peranan penting dalam proses penelitian sejarah sebagai sarana untuk menelaah literatur yang dilandasi pemikiran dan penelitian. Tinjauan pustaka juga diperlukan guna memperoleh data-data informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang dikaji. Tinjauan pustaka penelitian ini berfokus pada Sumatera pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia antara lain berkaitan dengan perang Palembang.

Perang Palembang adalah bagian dari rentetan peperangan anti kolonial terhadap penjajahan Inggris dan Belanda. Perang Palembang merupakan perang laut karena kesultanan Palembang Darussalam bercorak maritim. Perang Palembang diawali dengan perang menghadapi armada laut Inggris pada tahun 1812 dibawah pimpinan Mayjen R. R. Gillespie. Keinginan Inggris yang menghendaki kesultanan Palembang sebagai bagian dari kekuasaan Inggris. Sultan Mahmud Badaruddin II menolak dengan tegas keinginan Inggris. Alasan penolakan Sultan Mahmud Badaruddin II untuk tidak menyerahkan kesultanan Palembang kepada Inggris karena Palembang bukan merupakan bagian dari Belanda. Sebelum terjadinya perjanjian Tuntang pada tanggal 18 september 1811, kesultanan Palembang telah merdeka penuh dengan mengusir pasukan kolonial Belanda dari *Loji* sungai aur.³

Penolakan yang dilakukan Sultan Mahmud Badaruddin II menyebabkan Inggris melakukan serangan pada tahun 1812 dibawah pimpinan Mayjen R.R. Gillespie. Inggris melakukan politik “*Devide et Impera*” untuk melengserkan Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan di kesultanan Palembang Darussalam dengan mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai sultan. Sultan Mahmud Badaruddin II dan putera mahkota (Pangeran Ratu) meninggalkan kesultanan Palembang menuju ke daerah pedalaman sungai Musi (Muara Rawas). Sultan Mahmud Badaruddin II dibantu oleh pengikut setia dan rakyat membangun kekuatan untuk melawan Inggris yang berkedudukan di kota Palembang. Dalam peperangan melawan pasukan Inggris yang berkedudukan di kota Palembang dengan strategi perang gerilya. Perlawanan pertama dilakukan dengan memutus semua jalur lalu lintas ke kota Palembang. Perlawanan yang dilakukan Sultan

³ Djohan Hanafiah, *op.cit.*, hlm. 1.

Mahmud Badaruddin II mendapat perlawanan dari Inggris dibawah pimpinan Mayor Mears (Residen Palembang dan Bangka) di daerah Buaya Langu. Taktik perang gerilya yang dipakai Sultan Mahmud Badaruddin II membuat pasukan Inggris mundur dan daerah Buaya Langu dapat dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Dalam pertempuran yang terjadi di Buaya Langu mengakibatkan Mayor Mears luka parah dan akhirnya tewas dalam perjalanan menuju pulau Bangka.⁴

Mayor Robinson diangkat sebagai residen Palembang menggantikan Mayor Mears. Karena lambang kerajaan masih dipegang oleh Sultan Mahmud Badaruddin II dan pengaruh Sultan Mahmud Badaruddin II yang begitu besar sehingga pada tanggal 31 juni 1813 Mayor Robinson mengangkat kembali Sultan Mahmud Badaruddin II menjadi sultan di kesultanan Palembang Darussalam, sedangkan Sultan Ahmad Najamuddin II turun tahta dan menempati keraton di kota lama. Perang Palembang tahun 1819 dan tahun 1821 di latar belakang oleh ultimatum Mutinghe kepada Sultan Mahmud Badaruddin II untuk menyerahkan putera mahkota yaitu Pangeran Ratu. Strategi dan taktik yang digunakan Sultan Mahmud Badaruddin II dengan membangun kekuatan di benteng-benteng pertahanan dengan melengkapi benteng-benteng tersebut dengan meriam. Selain dengan meriam benteng pertahanan kesultanan Palembang dilengkapi juga dengan perahu rakit yang sewaktu-waktu bisa dibakar dan diarahkan ke kapal-kapal perang Belanda. Taktik Sultan Mahmud Badaruddin II untuk menghalau kapal perang Belanda dengan taktik diluar “*pagar*” (menghalau dan menghantam kapal-kapal perang Belanda di pintu masuk kesultanan Palembang yaitu pulau Bangka).⁵

Sultan Muhammad Bahaudin digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Raden Hasan Pangeran Ratu dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Sultan Palembang Darussalam yang ketujuh dan memerintah dari tahun 1803-1821.⁶

⁴ *Ibid*, hlm. 60-61.

⁵ *Ibid*, hlm. 89.

⁶ *Ibid*, hlm. 24-26.

Konvensi London tanggal 13 Agustus 1814 menetapkan bahwa Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda semua koloninya diseberang laut, yang dikuasainya sejak Januari 1803. Kebijakan di pusat pemerintahan kolonial ini, tidak mendapatkan suatu tanggapan yang baik dari Raffles. Raffles yang menjadi frustrasi dengan adanya penyerahan Nusantara dari tangannya kepada Belanda, demikian pula kedudukannya di Bengkulu, satu pos kecil yang kepegangannya tidak lebih dari Komisaris Komersial. Pemerintah Inggris masih mentolelir kemauan Raffles untuk menyandang Letnan Gubernur di Bengkulu. Thomas Stamford Raffles menggertak Batavia untuk mengosongkan Palembang dari pasukan Belanda. Ancaman Raffles adalah masalah Palembang yang akan dijadikan isu internasional selain dia tidak akan menyerahkan daerah Sumatera Barat ke Belanda. Alasan Raffles mencampuri urusan Palembang, karena Inggris diminta oleh Sultan Husin Diauddin untuk membantunya melawan Belanda yang membuat pemaksaan dalam perundingan dan merugikan pihak Palembang.⁷

Belanda dibawah pimpinan Mutinghe mengultimatum Sultan Mahmud Badaruddin II untuk menyerahkan Putra Mahkota yaitu Pangeran Ratu. Jelas hal ini ditolak dengan tegas oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Selain itu Mutinghe sebagai Komisaris dengan sengaja dan lancang membuat kebijakan-kebijakan pemerintahan tanpa konsultasi dengan Sultan Mahmud Badaruddin II. Hal ini lah yang membuat Sultan Mahmud Badaruddin II mengambil sikap untuk mengusir Belanda dari Palembang.⁸

Belanda pada waktu itu tetap menganggap Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai Sultan Palembang yang sah. Mutinghe mulai menjalankan politik adu dombanya (*divide et impera*). Selain masih adanya perlawanan dari pihak Inggris, perlawanan rakyat dan Sultan Mahmud Badaruddin II membuat Belanda begitu sulit untuk menguasai Palembang. Di daerah Muara Rawas, penduduk serentak melawan Belanda. Didalam rombongan besar itu, terdapat orang-orang Minangkabau yang dulu juga pernah membantu Sultan Mahmud Badaruddin II.

⁷ Djohan Hanafiah, (1986), *op.cit.*, hlm. 2

⁸ *Ibid*, hlm. 4.

Penduduk Muara Rawas mengepung Sungai Musi. Mereka merampas perbekalan dan amunisi yang dikirim ke Palembang. Pertempuran besar tidak dapat dihindarkan. Korban dipihak rakyat cukup banyak yaitu sebanyak 50 orang, dengan susah payah Mutinghe dan pasukannya kembali ke Palembang. Di pihak Belanda banyak jatuh korban selama Mutinghe mengadakan perjalanan ke pedalaman.⁹ Pasukan tambahan dari Batavia sebanyak 209 orang dibawah pimpinan Mayor Tierlam untuk menyerbu Palembang yang berangkat pada tanggal 4 Juni 1819 dengan kapal Elizabeth.

Sistem pertahanan Palembang dibangun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang seksama dan semua lalu lintas sungai di kuasai.¹⁰ Tidaklah mengherankan kalau di dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang mempunyai tugas khusus membuat sarana angkutan berupa berbagai bentuk dan ukuran perahu seperti *orang Senan atau Snouw* yang bukan saja ahli membuat perahu tetapi juga terkenal sebagai *ahli berkayu (orang-orang yang profesinya sebagai pengrajin)*.¹¹ Di wilayah Kesultanan dikenal pula dengan daerah yang dinamakan “*Sikap*” yaitu kelompok dusun atau himpunan dusun yang dikeluarkan dari wilayah Marga dan diperintah langsung oleh pegawai Kesultanan.¹² Kelompok *sikap* tersebut mengawasi dan menguasai Ogan dan Komering sebagai pusat penanaman padi dan penangkapan ikan.

Kelompok *sikap* lainnya ialah dusun – dusun yang terletak dibatas yang dapat dicapai perahu – perahu dagang (“*Toendan*” ialah perahu dagang pakai atap), antara lain *Sikap dalam Musi Ulu, Sikap dalam Lakitan, Muara Beliti, Baturaja dan Muara Rupit*. Jadi dengan demikian sistem sikap tersebut di atas merupakan salah satu unsur pertahanan wilayah yang alamiah dan ampuh.¹³

Perang Palembang merupakan perang melawan kedudukan Belanda di Palembang yang ingin menghancurkan Kesultanan Palembang namun mengalami

⁹ Mardanas Safwan, (2004), *op.cit.*, hlm. 67-68

¹⁰ P. De Roo de la Farille, *op.cit.*, hlm. 11.

¹¹ *Ibid*, hlm. 44-45.

¹² Van Royen J. W. “*De Palembangse marga en haar Grond – en Waterrechten*”, (Leiden: G.L. Van de Berg Adrianis Boekhandel, 1927), hlm. 37.

¹³ *Ibid*, hlm. 37-38.

beberapa kendala karena begitu kuatnya kekuatan Sultan Mahmud Badaruddin II sehingga sulit di taklukkan. Apalagi di daerah pedalaman sulit untuk dihancurkan karena Sultan Mahmud Badaruddin II memiliki kharisma dan wibawa yang tinggi dimata rakyatnya. Pada akhir Mei 1811, Thomas Stamford Raffles di dalam suratnya menyatakan bahwa ia berterima kasih apabila Sultan mau menghancurkan *loji* Belanda di Palembang. Selanjutnya dalam surat itu dinyatakan bahwa ada dikirim 80 pucuk senapan berikut 10 karung mesiu, serta dijanjikan pula bantuan militer.¹⁴

Sultan Mahmud Badaruddin II semakin matang dalam taktik dan strategi perang. Dia menghalau Belanda di luar "*pagar*", yaitu dengan mengacau dan sekaligus menghantam Belanda dipintu masuk, yaitu di Pulau Bangka. Kemudian sepanjang jalur yang digunakan sebagai pintu masuk dibuat hambatan-hambatan dengan meriam pencur (yang ditembakkan secara tersembunyi).

Pada tanggal 1 September 1819 dengan kekuatan pasukan yang cukup kuat dan dengan perhitungan yang cukup matang, Mutinghe kembali menyerang Palembang. Pada serangan ini Belanda di bawah pimpinan Mutinghe berhasil di pukul mundur. Pada tanggal 3 November 1819, Belanda melakukan kembali serangan dengan melemahkan perdagangan dan perekonomian rakyat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil mematahkan semangat juang Sultan Mahmud Badaruddin II.

Pada tanggal 13 Mei 1821 sebagian armada Belanda telah mencapai Muntok. Armada tersebut kemudian bergabung dengan kapal-kapal yang telah ada, yaitu yang bertugas meronda dan memblokade Selat Bangka dan sekitarnya. De Kock mengadakan konsolidasi seluruh pasukan dan armadanya untuk menunggu saat yang tepat untuk memasuki sungai Musi. Tanggal 15 Mei 1821 armada Belanda meninggalkan Mentok untuk memasuki sungai Musi melewati Sungsang (anak sungai musu).¹⁵ Pada tanggal 24 Juni 1821, Belanda kembali menyerang Palembang dan akhirnya menduduki benteng-benteng pertahanan

¹⁴ Stapel, F.H. "*Geschiedenis Van Ned, Indie*", (Amsterdam: Meulenhoff, 1930), hlm. 227.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 19-20.

Sultan Mahmud Badaruddin II. Pada tanggal 13 Juli 1821, Sultan Mahmud Badaruddin II dan Pangeran Ratu beserta keluarga-keluarganya diberangkatkan ke Batavia untuk kemudian diasingkan.¹⁶

Pada tanggal 13 September 1811 Sultan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh semua pembesar, alim ulama dan pemuka-pemuka masyarakat. Sultan menjelaskan tentang kejadian-kejadian di Jawa lalu memerintahkan agar Loji Belanda di sungai Aur berikut penghuni-penghuninya diamankan. Sementara itu, di luar Kraton telah disiapkan sejumlah 2.000 orang lascar bersenjata lengkap. Pada tanggal 14 September 1811, la mula-mula menolaknya, kemudian 87 orang digiring naik ke kapal pada hari itu, rupanya mereka mengadakan perlawanan, oleh karena itu sampai di muara Sungsang mereka dibunuh semuanya dan kapal ditenggelamkan. Peristiwa ini dikenal dengan "*penyembelihan massal*" (*Palembang Massacre*). Belanda menuding Raffles (Penguasa Inggris di Indonesia) sebagai biang keladinya karena menghasut Sultan melakukan itu, tetapi Raffles menolaknya dan menuduh Mahmud Badaruddin II yang bertanggung jawab mengenai hal ini. Empat hari sebelum terjadi penyerahan di Tuntang Sultan Mahmud Badaruddin II telah mengakhiri pengaruh kekuasaan Belanda di bumi Palembang. Dalam peristiwa ini, Sultan Mahmud Badaruddin II telah membuktikan bahwa beliau sebagai seorang pemimpin yang mempunyai pandangan jauh kedepan dan dapat mempergunakan kesempatan yang tepat untuk membebaskan Kesultanan dan rakyat Palembang dari pengaruh kekuasaan asing.¹⁷

Awalnya perlawanan rakyat Jambi dengan Belanda masih bersifat pemboikotan penjualan hasil bumi, hutan, maupun perdagangan lain yang dimonopoli Belanda. Akibat pemboikotan ini, kantor dagang di Muaro Kumpeh ditutup, karena tidak ada transaksi penjualan hasil bumi kepada Belanda. Kondisi ini tidak diinginkan Belanda. Berbagai upaya untuk mengadakan perjanjian baru terus dilakukan kendati tidak mendapat tanggapan, apalagi Pangeran Ratu Thaha Saifuddin dalam kewenangannya sebagai Perdana Menteri semakin membatasi kemungkinan diadakannya pertemuan dengan Belanda.

¹⁶ R.M. Husin Nato Dirajo, *op.cit*, hlm. 7-9.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6

Ketika Pangeran Ratu Thaha Saifuddin dinobatkan menjadi Sultan pada tahun 1856, ia tidak mengajukan restu ke Pemerintah Belanda. Sultan hanya memberitahun penobatannya, karena yang dibuat melalui perjanjian adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Sultan yang mengarah pada jalan pencaplokan kesultanan. Dengan berani Sultan Thaha membatalkan semua perjanjian dengan Belanda yang dibuat secara paksa oleh ayahnya.

Sikap perlawanan yang ditujukan Sultan sangat mengejutkan Belanda. Tak ada jalan lain, Belanda mengancam menangkap Sultan dan membuangnya ke Batavia. Sultan tak gentar, bahkan mempersiapkan pasukan menyerang Muaro Kumpeh.

Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah *Nederlandsch* Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 Tanggal 4 Mei 1906¹⁸.

Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih selama 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. perjalanan perjuangan Revolusi dari Rakyat Jambi serta dilengkapi dengan pembahasan mengenai pembentukan organisasi militer di daerah Jambi¹⁹ yang dipicu oleh kedatangan bala tentara Jepang yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Jambi sehingga menimbulkan keinginan rakyat untuk membentuk kekuatan militer pada saat itu.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara Republik Indonesia, yang mana pada masa itu Sumatera menjadi satu Provinsi yaitu

¹⁸ Dalam buku '*Sejarah sosial Jambi ; Jambi sebagai kota dagang*' (Jakarta ; Depdikbud, 1984)

¹⁹ Bambang Suwondo, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jambi*, Jakarta: Depdikbud, 1979. Hlm. 59.

Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibukota sedangkan jabatan Gubernur dipegang oleh MR.Teuku Muhammad Hasan²⁰.

b. Historiografi yang Relevan

Penulisan sejarah sebagai suatu rekonstruksi peristiwa masa lampau yang membutuhkan sumber-sumber yang relevan dengan tema atau pokok bahasan. Historiografi merupakan rekonstruksi melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau.²¹ Tahap penulisan sejarah mendorong sejarawan menggunakan kemampuan baik kemampuan teknis, penggunaan kutipan atau catatan serta penggunaan pemikiran kritis dan kemampuan analisisnya terhadap suatu masalah. Hal ini dilakukan agar dalam tahap akhir penulisan, sejarawan dapat menghasilkan sintesis dari seluruh penelitian dalam bentuk tulisan disebut historiografi²².

Historiografi yang relevan bertujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya sehingga dapat menghindari kesamaan hasil tulisan penulis dengan hasil tulisan sebelumnya. Penggunaan historiografi yang relevan sangat dibutuhkan sebagai pembanding dan penimbang sebuah karya penulisan sejarah.

Historiografi menurut Louis Gottschalk adalah proses rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan menganalisa secara kritis rekamna serta peninggalan sejarah masa lampau²³. Berdasarkan hal tersebut historiografi yang relevan sangat penting untuk mengetahui tingkat keaslian karya sejarah penulis. Historiografi yang relevan dibahas dalam tugas akhir ini bertujuan untuk menghindari

²⁰ Abu bakar Rony, *Penyusunan Pemerintahan Sipil dan Kekuatan Bersenjata tahun 1945- 1949 Di Daerah Keresidenan Jambi*, Jambi : Dewan Pimpinan Cabang legium Veteran RI Kabupaten Batanghari, 2009. Hlm. 18

²¹ Louis Gottschlmlk, *Mengerti sejarah*, a.b. Nugroho notosusanto, (jakarta ; UI Press,1986), hlm.32.

²² Helius Syamsudin dan Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta : Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1996), hlm .153.

²³ Louis Gottschlmlk *op cit.*,. Hlm.32

kesamaan hasil karya penulis dengan hasil karya sejarah yang sudah ada. Adapun historiografi relevan dalam penulisan ini adalah :

Dalam meneliti sejarah perlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II terhadap Belanda, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah historiografi, seperti karya R.M Husin yang berjudul “Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II” dibuat untuk mengetahui sejarah yang dilakukan Sultan Mahmud Badaruddin II dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda yang terjadi di Palembang.²⁴ Dalam buku perang Palembang 1819-1821, karya Djohan Hanafiah menceritakan kegigihan Sultan Mahmud badaruddin II dan rakyat Palembang melawan penjajahan Belanda.²⁵

Penulis juga menggunakan disertasi M.O. Woelders yang dalam disertasinya berjudul “ *Het Sultanat Palembang (1811-1825)* “ tokoh utama dari drama yang menghasilkan sebagian sejarah historiografi Indonesia ini tidak disangsikan lagi adalah Mahmud Badaruddin, yang menurut kesaksian pihak kawan dan lawan adalah orang besar (“*een man van format*”). Seorang Raja yang agung dengan amal-amalannya yang baik dan kurang baik, karena kepribadiannya yang kuat, maka baik Ahmad Najamuddin maupun anggota-anggota keluarga lainnya sepenuhnya dibawah pengaruhnya.²⁶ “ *Never a Tame Tiger*” judul karya Tulisan R.A. Lovell sudah menggambarkan sikap Sultan Mahmud Badaruddin II laksana “ harimau yang tak dapat dijinakkan”, pada akhir tulisan itu dikatakannya bahwa Sultan-sultan Palembang telah berjuang untuk kemerdekaan negerinya sampai detik nafas terakhir.²⁷

Tesis karya Lindayanti Pasca Sarjana Ilmu sejarah FIB Univeritas Indonesia, yang berjudul *Perkebunan Karet Rakyat Di Jambi Pada Masa*

²⁴ R.M. Husin Nato Dirajo, Sejarah Perjuangan Almarhum Sultan Mahmud badaruddin II, (Sumatera Selatan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Museum, 1985).

²⁵ Djohan Hanafiah, *Perang Palembang 1819-1821*, (Palembang: Parawisata Jasa Utama, 1986).

²⁶ Woelders, M.O. “ *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*”, terjemahan H.A. Bustari, (Amsterdam: Martinus Nijhoff; 1975).

²⁷ Lovell R.A. *Never a Tame Tiger*, majalah stanvac vol. III no. 5 May 1958. Halaman 18.

Pemerintahan Hindia Belanda 1906-1940. Membahas tentang perkembangan karet rakyat diJambi pada masa awal dimulai dari penanaman karet di Jambi. Selain itu juga membahas tentang masa keemasan karet di Jambi sekitar tahun 1915²⁸ yang membawa Jambi berada pada masa puncak kejayaan tanaman karet sebagai pengeskor utama tanaman karet sehingga membawa perbaikan ekonomi bagi masyarakat Jambi pada masa ini, masa yang dikenal dengan istilah masa hujan emas²⁹ di Jambi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian sebelumnya lebih berkonsentrasi terhadap masa-masa kejayaan hujan emas di Jambi dan juga membahas tentang menurunnya perekonomian petani karena disebabkan turunnya harga komoditas karet dunia. Sedangkan penelitian ini lebih berkonsentrasi terhadap masalah sosial ekonomi pada masa abad ke sembilan belas di Jambi.

II. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Sejarah sebagai disiplin ilmu mempunyai metode tersendiri dalam mengungkapkan peristiwa sejarah masa lampau agar menghasilkan karya sejarah yang kritis, ilmiah, dan objektif. Metode sejarah adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah.³⁰ Metode sejarah adalah suatu proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisa secara kritis terhadap data-data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita yang dapat dipercaya.³¹

Garraghan menyebut metode sejarah sebagai proses yang kompleks. Metode sejarah sebagai langkah mendasar, penilaian kritis terhadap

²⁸ Lindayati *op cit.*, Hlm .38.

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 54.

³⁰ Kuntowijoyo, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1994), hlm. xii.

³¹ Helius Syamsuddin dan Ismaun, (1996), *op.cit.*, hlm. 61.

sumber informasi dan eksposisi yang dijadikan dengan terperinci.³² Dengan kata lain metode sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan.³³

Menurut Nugroho Notokusanto ada empat tahap dalam metode penelitian sejarah yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi.³⁴

Adapun langkah-langkah penulisan sejarah ini yaitu:

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik sebaiknya dipilih berdasarkan dengan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.³⁵ Kedekatan emosional peneliti terhadap objek kajiannya Sultan Mahmud Badaruddin II, berdasarkan kedekatan pada kota tersebut karena di wilayah ini terkenal akan sejarah perjuangannya yaitu Perang Palembang 1819-1821 selain itu merupakan tempat tinggal peneliti. Kedekatan intelektual yang dirujuk disini adalah kemampuan si peneliti dalam mengkaji objek penelitiannya. Dalam pemenuhan sumber untuk keterkaitannya dengan revolusi kemerdekaan di Sumatera Selatan dan Jambi

2. *Heuristik (pengumpulan data)* merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, materi sejarah atau evidensi sejarah.³⁶ Sumber merupakan hal yang paling penting dalam penyusunan karya sejarah. Tanpa adanya sumber peristiwa sejarah

³² Garraghan, Gilbert J., *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University, 1957), hlm. 33-34.

³³ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 53.

³⁴ Nugroho Notokusanto, *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1971), hlm. 19.

³⁵ *Ibid*, hlm.91.

³⁶ Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm.89.

tidak akan dapat direkonstruksi menjadi sebuah kisah. Sumber sejarah merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau.³⁷

Sumber sejarah diperlukan guna merekonstruksi peristiwa sejarah. Adapun sumber-sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sebuah sumber primer menurut Louis Gottschalk adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata-kepala sendiri atau saksi dengan panca indera lain, atau alat mekanis yang hadir dalam peristiwa tersebut.³⁸ Sebuah sumber primer haruslah sejaman dengan terjadinya peristiwa.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder menurut Louis Gottschalk adalah kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata.³⁹ Sumber sekunder berupa kesaksian dari siapa saja yang bukan merupakan saksi mata. Sumber yang bersalah dari garapan terhadap sumber aslinya atau literatur. Sumber ini berisi bahan-bahan asli yang telah digarap sebelumnya. Sumber-sumber tambahan inilah yang menjadi sumber untuk menyusun penelitian ini, selain sumber primer.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pengujian terhadap sumber-sumber sejarah. Baik yang dilakukan secara intern (kritik intern) maupun secara ekstern (kritik ekstern). Kritik intern lebih berkaitan dengan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai sedangkan kritik

³⁷ Helius Syamsuddin dan Ismaun, (1996), *op.cit.*, hlm.61.

³⁸ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 35.

³⁹ *Ibid.*

ekstern berkaitan dengan otentitas atau keaslian sumber.⁴⁰ Tahap ini sangat menentukan langkah selanjutnya dalam tahapan interpretasi.

3. Interpretasi

Interpretasi dapat diartikan sebagai penafsiran. Interpretasi juga berarti mengerti, metode khusus yang diajukan guna mendekati sejarah.⁴¹ Dalam merekonstruksi sejarah, sejarawan berupaya untuk menguraikan sumber, dimana sumber terkadang mengandung kemungkinan-kemungkinan sehingga ditemukan struktur logisnya berdasarkan fakta yang ada.⁴² Dari berbagai fakta kemudian dirangkai menjadi suatu generalisasi yang urut agar mempunyai bentuk dan struktur setelah itu data yang terkumpul disatukan menjadi fakta yang akurat. Tahap ini terbagi dalam dua langkah, yaitu analitis dan sintesis. Analitis berarti menguraikan sedangkan sintesis berarti menyatukan. Dalam tahap interpretasi ini sejarawan dituntut untuk mampu mencari bagian-bagian yang hilang dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang lampau dan mampu menjelaskan realita masa lampau.

4. Historiografi

Historiografi yaitu penyampaian sintesis yang diperoleh melalui penelitian. Setelah melakukan analisis data akan dihasilkan sintesis hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk suatu karya sejarah yang dituangkan dalam bentuk tulisan.⁴³ Penulis menerangkan semua data yang telah terseleksi dan telah diinterpretasikan berdasarkan prinsip kronologi. Tahap ini merupakan tahap terakhir bagi penulis untuk menyajikan semua fakta ke dalam bentuk tulisan.

⁴⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995), hlm. 101.

⁴¹ Kuntowijoyo, (1994), *op.cit.*, hlm. 3.

⁴² Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 110.

⁴³ Kuntowijoyo, (1994), *op.cit.* hlm. 101.

5. Penulisan (Sintesis) merupakan tahap terakhir dalam langkah penulisan sejarah. Tahap ini adalah penyampaian sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu karya sejarah. Penulisan ini disusun secara ilmiah karena ditujukan untuk penelitian skripsi.

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah menjadi masa lampau.⁴⁴ Untuk mengungkapkan peristiwa dalam penulisan sejarah, perlu dilakukan pendekatan multidimensional agar permasalahan yang diteliti dapat diungkapkan secara komprehensif. Pendekatan multidimensional ini memang sesuai untuk mempelajari fenomena historis secara kompleks. Ada nilai strategis dari pendekatan multidimensional ini, yaitu daya penerangnya untuk mengatasi pendekatan yang berakar pada filsafat tertentu dan menimbulkan determinisme.⁴⁵ Untuk memperjelas permasalahan yang terjadi maka pembahasan skripsi ini akan menggunakan pendekatan politik, pendekatan sosial, pendekatan sosiologis, dan pendekatan psikologis.

1. Pendekatan Politik

Pendekatan politik adalah segala usaha, tindakan atas suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dan bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah dan mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.⁴⁶ Menurut Deliar Noor adalah segala usaha, tindakan atas suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah dan mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.⁴⁷ Pendapat lainnya

⁴⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), hlm. 71.

⁴⁵ *Ibid.*, 1993, hlm. 18.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

⁴⁷ Deliar Noor, *Pengantar ke Pemikiran Politik I*. (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm.5.

yang mencoba mendeskripsikan persoalan tentang politik adalah pendekatan yang mengarah pada struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan dan lain sebagainya.⁴⁸ Pendekatan politis ini digunakan untuk mengetahui situasi politik pada masa penjajahan Belanda, dalam proses penaklukan Kesultanan Palembang dan Jambi.

2. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial bertujuan untuk mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat yang terikat dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan agama dan tingkah laku.⁴⁹ Menurut Soerjono Soekanto Interaksi sosial merupakan dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan antarindividu, antarkelompok, atau antara individu dan kelompok. Menurut Astrid. S. Susanto adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Hasil interaksi sangat ditentukan oleh nilai dan arti serta interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi ini.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah suatu pendekatan yang menerangkan peranan sosiologi dalam menjelaskan perilaku manusia.⁵⁰ Pendekatan sosiologis ini dimaksudkan untuk menepohong segi-segi sosial peristiwa yang diteliti, misalnya golongan mana yang terlibat dan berperan serta nilai-nilai dan hubungannya dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan ideologi dan sebagainya. Pendekatan sosiologis dalam penulisan skripsi ini banyak digunakan.

4. Pendekatan Psikologis

⁴⁸ Sartono Kartodirdjo, *Op.Cit.*, hlm.144.

⁴⁹ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Akasara. 1984), hlm.2.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 469.

Pendekatan psikologis sangat bermanfaat untuk melihat perkembangan sikap, perilaku dan kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Seperti disebutkan oleh Lades dan Tilly yang dikutip Helius Sjamsudin bahwa dengan dimasukkannya pendekatan psikologis dalam analisis biografis maka akan memperkaya pemahaman terhadap tingkah laku seseorang.⁵¹ Tentang hal ini Sartono Kartodirdjo juga menegaskan bahwa untuk menyelami mentalis seorang tokoh diperlukan analisis psikolog agar segi emosional, moral dan rasionalnya lebih bisa tampil.⁵²

⁵¹ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 469.

⁵² Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 40.

BAB III

REVOLUSI KEMERDEKAAN DI SUMATRA ABAD XX

Zaman revolusi fisik (1945-1950) merupakan suatu zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, hak-hak Indonesia akan kemerdekaan ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa oleh bangsa Indonesia. Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan suatu kisah sentral dalam sejarah Indonesia melainkan merupakan suatu unsur yang kuat di dalam persepsi bangsa Indonesia itu sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk suatu tatanan sosial yang lebih adil akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba. Tradisi nasional yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia berjuang bahu-membahu selama revolusi hanya merupakan sedikit dasar sejarah.⁵³

7 Desember 1941 pukul 07.45 (waktu Hawaii) di hari Minggu pangkalan Amerika Serikat di Pasifik yaitu Pearl Harbour secara mendadak dibom oleh 183 pesawat-pesawat udara Jepang. Kalangan militer Hindia Belanda di Batavia masih belum sadar akan kegentingan situasi dan tetap mengharapkan bantuan dari Pacific Fleet. Senin 8 Desember 1941 pukul 3 dini hari telepon berdering dikamar tidur istana Gubernur Jenderal (GG) Hindia Belanda, Jongkheer Tjarda Van Starkenborgh Stachower, telepon berasal dari Kepala Dinas Penerangan Pemerintahan, dia melaporkan bahwa suatu siaran radio pribadi seorang Amerika memberitakan bahwa Pearl Harbour telah diserang Jepang. Pada jam-jam berikutnya orang mendengar berita tentang pemboman-pemboman di Siam, Malaka, Singapura dan Filipina.

Indonesia was divided into three regions by the Japanese. Sumatra was placed under the 25th Army, while Java and Madura were under the 16th

⁵³ Ricklefs, op. cit. 1991: 317.

Army; both of these were under the 7th Area Army with its headquarters in Singapore. Kalimantan and East Indonesia were controlled by the navy. Policies differed among these regions. In general, Java was perceived as the most politically advanced and least economically important area, its main resource being people. Japanese policies there stimulated nationalism very much more than in the other two regions, and the greater political sophistication of Java over other areas was thereby enhanced. Because of the significance of these developments for the future, Java has also received greater scholarly attention than the other islands. Sumatra was important for its strategic resources and only when Japan was on the brink of defeat were nationalist ideas encouraged there. The area under naval control was regarded as politically primitive and economically essential to Japan; it was governed in the most repressive manner of all.⁵⁴

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Republik Indonesia memproklamkan diri menjadi sebuah negara yang merdeka. Zaman revolusi fisik Indonesia pun dimulai, perjuangan-perjuangan dilakukan lewat jalur perundingan maupun tindakan-tindakan revolusioner berupa konfrontasi langsung. Pihak-pihak yang mendukung jalur diplomasi seperti Sutan Sjahrir beranggapan bahwa diplomasi adalah jalan keluar yang paling realistis agar Republik di akui secara de facto oleh dunia internasional khususnya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Sementara pihak lainnya seperti Jenderal Sudirman beranggapan bahwa berunding dengan Pemerintahan Belanda tidak ada gunanya dan hanya akan merugikan Republik saja, tuntutan Merdeka 100% serta slogan-slogan “merdeka atau mati” menjadi tujuan perjuangan revolusioner.

Sumatera di saat Proklamasi tersebut menjadi satu provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibu kotanya, serta MR Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan gubernur⁵⁵. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukittinggi dan memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga sub provinsi, yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup Karesidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Adapun berjalannya revolusi kemerdekaan di berbagai wilayah di Sumatra yaitu sebagai berikut:

⁵⁴ Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 247

⁵⁵ D. Rini Yunarti, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*, Jakarta : Kompas, 2003, hlm. 145.

1. Aceh

Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh, yaitu pada tahun 1941 dan awal tahun 1942, kebencian rakyat terhadap Belanda semakin bertambah memuncak yang walaupun Belanda telah berusaha dengan bermacam-macam cara untuk menghadapinya, namun rasa kemarahan rakyat tidak dapat dibendung lagi. Hal ini akan terlihat dari berbagai kegiatan rakyat yang bertujuan untuk menentang penjajahan Belanda baik yang merupakan perjuangan dalam bentuk fisik, maupun dalam bentuk kegiatan politik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintah yang masih berkuasa. Kedua bentuk kegiatan ini dipelopori oleh para ulama dan *uleebalang*, yang kedua golongan ini mempunyai pengaruh cukup besar di dalam masyarakat Aceh.

Perjuangan dalam bentuk politik, misalnya dengan mengadakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi Belanda, serta mengadakan hubungan dengan luar Negeri guna memperoleh bantuan. Ke Semua kegiatan ini bertujuan memperoleh kembali kemerdekaan yang sudah demikian lama diperjuangkan. Kegiatan mengadakan rapat ini misalnya rapat rahasia pada bulan Desember 1941 yang dihadiri oleh Tengku (Tgk) Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Abdul Wahab, yang kedua-duanya dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Teuku (T.) Nyak Arief (Panglima Sagi XXVI Mukim), T. Muhammad Ali, Panglima Poleh (Panglima Sagi XXII Mukim), T. Ahmad (ulee balang Jeunib — Samalanga). Rapat ini diselenggarakan di Lamnyong (rumah T. Nyak Arief) dengan mengucapkan ikrar bersama yaitu dengan bersumpah setia kepada agama Islam, bangsa dan tanah air, menyusun pemberontakan bersama melawan pemerintah⁵⁶

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Aceh merupakan salah satu keresidenan dalam Provinsi di Sumatra. Residen yang pertama Teuku Nyak Arief, menjalankan pemerintahan bersama Komite Nasional Daerah pimpinan Tuanku Mahmood. Dalam menjalankan tugasnya memang sangat berat menjalankan roda pemerintahan di tengah berkecamukannya revolusi kemerdekaan menyebabkan

⁵⁶ Muhamad Ibrahim et.al, (1983). Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh. Jakarta: Depdikbud, hlm. 1

kondisi politik dan keamanan tidak kondusif karena masih adanya provokasi musuh. Jepang masih bersikap seperti biasa, tidak mau beranjak dari kantor-kantor yang selama ini ditempatinya. Alasannya, mereka menanti sekutu, pihak yang berhak untuk mengambil alih kedudukan mereka, keadaan tersebut dapat diatasi dengan kekerasan. Dengan pimpinan Teuku Nyak Arief, kantor pusat pemerintah daerah yang disebut Atjeh Syu Seityo Gunseibu dapat diambil alih, kemudian sengketa terjadi, namun tidak sampai terjadi pertumpahan darah.

Pemberitaan mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu dan kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh masyarakat Aceh diterima agak terlambat. Dalam kaitan ini Alfian menguraikan sebagai berikut :

*Berita menyerah kalahnya jepang, baru pada tanggal 23 Agustus resmi diketahui rakyat, karena pada tanggal tersebut Atjeh Syu Tyokon (Residen aceh) memanggil para pemimpin rakyat setempat ke kediamannya (Pendopo Gubernur sekarang). Dalam pertemuan itu S. Lino secara resmi menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan situasi daerah Aceh, dan posisi Jepang pada waktu itu. Ia menegaskan bahwa perang telah selesai dan kepada pemimpin rakyat dianjurkan untuk bersama dengan pemerintahan Jepang menjaga keamanan di daerah Aceh.*⁵⁷

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, pada tanggal 25 Agustus 1945 Tyokan S. Lino mengeluarkan sebuah maklumat yang ditujukan kepada seluruh rakyat Aceh, yang menyatakan bahwa peperangan Asia Timur Raya telah berakhir dan kemarahan Dai Nippon telah bersedia melangsungkan perdamaian dengan sekutu. Pada tanggal 27 Agustus 1946 pesawat tempur sekutu menjatuhkan surat selebaran di Kutaraja dan di kota-kota lain di Aceh. Selebaran tersebut ditujukan kepada penduduk Indonesia, dengan menyatakan bahwa perang telah selesai. Jepang telah mengaku tunduk dan tidak dengan perjanjian, dan ditutup dengan hiduplah Seri Ratu, Hiduplah.⁵⁸

⁵⁷ Teuku Ibrahim Alfian, (1982). Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949). Banda Aceh: Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, hlm. 67

⁵⁸ Rusdi Sufi, et.al., (1997). Peranan tokoh agama dalam perjuangan kemerdekaan, 1945-1950 di Aceh. Jakarta: Depdikbud, hlm: 67

Sebenarnya berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terlambat diterima di Aceh karena Mr. T.M. Hasan dan DR. Amir pulang dari Jakarta sebagai utusan dari Sumatra Utara yang duduk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terlambat tiba di Sumatra. Hal ini disebabkan karena sarana perhubungan, baik sarana transformasi maupun sarana telekomunikasi pada waktu itu masih dikuasai oleh tentara Jepang.

Dalam konsultasi ini T. Nyak Arief setuju supaya bekas Gyugun dan Heiho dan Tokubestu dan lain-lainnya berkumpul dalam sebuah organisasi demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu. Sesuai dengan persetujuan tadi maka pada tanggal 27 Agustus 1945 dibentuklah sebuah organisasi yang diberi nama dengan API (Angkatan pemuda Indonesia) dan pada hakekatnya adalah Angkatan Perang Indonesia untuk seluruh Aceh bermarkas di Kutaraja dan sebagai ketua Sjamaun Gaharu (Komandan). T. Hamid Azwar sebagai kepala staf beserta Wakil Markas daerah di daerah-daerah seluruh Aceh.

Mengenai persiapan dan lain-lain pada mulanya belum dimiliki oleh API, maka untuk keperluan ini perlu dipersiapkan suatu rencana operasi khusus supaya senjata Jepang jatuh ke tangan API. Dengan peristiwa demi peristiwa terus berlangsung di Aceh sampai kepada perlawanan menghadapi Jepang, perlawanan menghadapi Belanda di Medan Area dan terus kepada penyerahan kedaulatan Indonesia secara resmi. Dimana rakyat Aceh tergabung dalam Angkatan Pemuda Indonesia banyak berjasa dalam mempertahankan revolusi 1945.

2. Palembang

Sejak permulaan abad XVII sampai abad XX kerap kali timbul peperangan dan pemberontakan yang tidak berhasil karena jeleknya senjata kita dan baiknya taktik-taktik Belanda sehingga dapat mengalahkan kita.⁵⁹ Beberapa perlawanan yang umumnya dikendalikan dari kota Palembang seperti di Musi Rawas, yang dikenal dengan Perang Kelambit, perlawanan di Komering Ulu, perlawanan di Karta Mulia dan beberapa tempat lainnya.⁶⁰ Pengalaman pahit yang

⁵⁹A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Perjuangan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1970), hlm. 6.

⁶⁰Alfian Ibrahim, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sumatera Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), hlm. 83-92.

berkepanjangan inilah yang kemudian mendapatkan jalan keluar pada awal abad XX. Perkembangan ini bertambah pesat seiring dengan politik kolonial menjadi terbuka seperti dihapuskannya larangan untuk mengadakan perkumpulan, persidangan politik setelah dibukanya *Volksraad*. Dalam *Volksraad* kesempatan membicarakan soal-soal pemerintahan negeri, pertumbuhan lalu lintas dan persurat kabaran telah membuka ketertutupan yang selama ini membelenggu masyarakat.⁶¹

Berperannya kota Palembang sebagai pusat perlawanan dan perjuangan dapat dipahami. Sejak zaman kuno pemusatan penduduk ada di kota, Bandar, pusat pemujaan dan di persimpangan jalan.⁶² Perkembangan organisasi sosial dan politik sejak awal abad ke 20 menjadikan kota Palembang sebagai sumber timbulnya pejuang kemerdekaan. Berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 tidak banyak pengaruhnya di Palembang. Budi Utomo lebih banyak pengikutnya di pulau Jawa, sedangkan Sareka Islam merupakan organisasi atau partai politik pertama yang mempelopori tumbuh dan berkembangnya para pejuang di Palembang.

Dr. A. K Gani meskipun baru pindah ke Palembang pada pertengahan tahun 1941 beliau cepat dikenal oleh masyarakat Palembang. Dia adalah seorang ketua Gerindo dan ketua GAPI. Kehadirannya di Palembang setelah dia menyelesaikan sekolah dokternya di Jakarta dan akan membuka praktek di Palembang. A. K Gani telah meramalkan bahwa Jepang pasti menyerang Hindia Belanda dan wilayah yang lebih dulu diserangnya adalah wilayah yang mempunyai sumber minyak yaitu Palembang dan Balikpapan. Palembang adalah tempat penyulingan minyak yang terbesar di Asia.

Pada tanggal 12 Februari 1942, pesawat Sekutu memantau iringan armada Jepang yang sedang mendekati Singapore. Pada malam hari tanggal 13 Februari, armada Jepang sudah mendaratkan pasukannya di pulau Bangka, pangkalan untuk mengejar sasaran utama, Palembang. Palembang sudah diduduki pada tanggal 14 Februari, sebelum Singapore jatuh satu hari kemudian. Sedangkan daerah-daerah

⁶¹A. K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm. 10.

⁶²Marwati Djoenet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 20

Sumatera yang lainnya baru sekitar minggu kedua bulan Maret. Akibatnya seperti diramalkan semula, ketika Jepang mendarat secara tiba-tiba di Palembang pada hari pertama, Sabtu tanggal 14 Februari 1942, pertahanan KNIL Belanda di Palembang di buat kocar-kacir dan tidak dalam keadaan siap tempur. Satu hari kemudian Palembang dapat dikuasai sepenuhnya. Perintah politik bumi hangus diinstruksikan dari Jawa sebelum pendaratan Jepang ke Palembang menjadi berantakan. Hanya satu dari dua instalasi minyak terpenting di Palembang yang sempat dibinasakan, yaitu Sungai Gerong sedangkan Plaju masih relatif utuh.

Setelah Palembang diserbu pada tanggal 14 Februari 1942, pada tanggal 16 Februari 1942 Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Dengan jatuhnya Palembang sebagai sumber minyak, maka terbentuklah pulau Jawa sebagai basis bagi tentara Jepang. Guna menghadapi serangan ofensif Jepang tersebut dibangun komando gabungan oleh pihak sekutu yang disebut ABDACOM (*American British Dutch Australian Command*).

Residen Palembang Oranye mengeluh putus asa” Jepang telah memermalukan kami lebih buruk dari kuli Jawa”. Nasib Residen Palembang masih baik, tidak semujur apa yang dialami oleh Residen Lampung G. W. Meindesma. Residen Bengkulu C. E. Maier akhirnya harus tewas ditangan Jepang. Mereka dituduh menghancurkan semua berkas dan dokumen Keresidenan, sehingga Jepang tidak dapat mengharapakan banyak dari Keresidenan tersebut. Sebaliknya Direktur perusahaan BAM (Bukit Asam Meijn) di Tanjung Enim lebih dulu memilih “hara-kiri” dengan melompat dari tambang dari pada berurusan dengan Jepang.

3. Jambi

Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih selama 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. perjalanan perjuangan Revolusi dari Rakyat Jambi serta dilengkapi dengan pembahasan mengenai pembentukan organisasi militer di daerah Jambi⁶³ yang dipicu oleh

⁶³ Bambang Suwondo, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jambi*, Jakarta: Depdikbud, 1979. Hlm. 59.

kedatangan bala tentara Jepang yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Jambi sehingga menimbulkan keinginan rakyat untuk membentuk kekuatan militer pada saat itu.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamlirkanlah Negara Republik Indonesia, Semangat nasionalisme berkoar di seluruh penjuru negeri Indonesia, tiidak pandang bulu semua rakyat indonesia ikut serta menikmati euforia rasa kemenangan atas Kemerdekaan Bangsa Indonesia atas penjajahan Jepang. Begitu juga dengan daerah Jambi, daerah Jambi menerima berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah dr.A.K.Gani dari Palembang melalui telephon menyampaikan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kepada R. Sudarsono, pimpinan buruh di pertambangan minyak Jambi.⁶⁴

Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ini disambut gembira oleh masyarakat daerah Jambi yang kemudian membangunkan semangat patriotisme dikalangan pemuda, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai dan semua lapisan masyarakat daerah Jambi untuk terus mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

Pasca diterimanya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para tokoh Nasional daerah Jambi segera melakukan pembentukan Badan-badan Perjuangan dan kelengkapan organisasi pemerintahan yang berfungsi sebagai wadah untuk memepertahankan kemerdekaan seperti pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia yang diketuai oleh Abunjani⁶⁵ dan pembentukan Komite Nasional Indonesia daerah Jambi yang diketuai oleh Maklam.

Bendera Merah Putih dikibarkan di puncak menara air oleh para pemuda Jambi, antara lain R. Hoesen, Akipo, dan Amin Aini. Sementara itu, Kantor Pengadilan Jepang (dekat RS. Thersia sekarang) beberapa pejuang, seperti Zuraida, Nuraini, Sri Rexeki, Nurlela, dan Nursiah menurunkan bendera Jepang (*Hinomaru*) dan menggantinya dengan menaikan bendera Merah Putih. Praktis

⁶⁴ Dewan Pimpinan Cabang Legium Vetran RI, *Penyusunan Pemerintah Sipil dan Kekuatan Bersenjata Tahun 1945-1949 Di Daerah Jambi*, (Jambi : Depdiknas, 2009), hlm. 13.

⁶⁵ Dewan Harian Daerah Angkatan 45, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI (1945-1949) Di Provinsi Jambi*, (Jambi : CV.Majelis Raya Offset, 1991). Hlm.15

pada 22 Agustus 1945 bendera Merah Putih berkibar di Jambi dan beberapa kota lainnya di Keresidenan Jambi. Pada tanggal tersebut merupakan awal gerakan kemerdekaan Indonesia di Jambi, yaitu terbentuknya Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang diketuai oleh Abunjani. API ini bertugas menjaga ketertiban, keamanan, membela, dan mempertahankan kemerdekaan.

Menindaklanjuti pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI), Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan Badan Penolong Keluarga Perang (BPKKP) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di Jakarta, pada 25 Agustus 1945 terbentuklah KNI Jambi yang dilantik pada Oktober 1945. Selain mengetuai BKR, Abunjani juga ditunjuk mengetuai kelompok pemuda dari KNI. Pada 5 Oktober 1945 BKR diganti namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan komandannya Abunjani yang berpangkat Kolonel.

Pada 24 Juni 1946 TKR pun dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan Jambi kesatuannya menjadi Resimen II Divisi II Jambi sebagai bagian dari Sumatera Selatan. Sebelumnya, pada 17 Juni 1946 diadakan penyempurnaan susunan Dewan Pertahanan Daerah Keresidenan Jambi yang diketuai Inu Kertapati dan Kolonel Abunjani sebagai wakil ketua. Residen II Divisi II pada 3 Juni 1947 dirubah lagi menjadi Resimen 43 Jambi dan terakhir menjadi Brigade Garuda Putih. Pada 10 September 1947 menyusul Agresi Belanda, Keresidenan Jambi dibentuk Komando Daerah Militer Jambi dengan komandannya Kolonel Abunjani dan wakilnya Letnan Kolonel Tituler R. Soedarsono. Komando Daerah Militer Jambi kemudian pada 1 Juni 1948 menjadi TNI Sub Teritorium Djambi (STD) sebagai bagian TNI Sub Komando Sumatera Selatan (Sub KOSS) dengan komandannya Kolonel Abunjani.

Dalam kedudukannya sebagai Komandan STD Jambi merangkap pimpinan Komando Daerah Militer Brigade Garuda Putih dipegang sejak Juni 1948 hingga Januari 1949. Adanya kebijakan rasionalisasi di kalangan TNI, pangkat Kolonel Abunjani diturunkan menjadi Letnan Kolonel. Walaupun demikian, Letnan Kolonel Abunjani tetap di militer dengan jabatan rangkap sebagai Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan khusus daerah Jambi, juga sebagai Komandan STD sampai pertengahan Januari 1950. Terhitung Februari

1950 Letnan Kolonel Abunjani mengundurkan diri dari TNI beralih profesi menjadi seorang pengusaha di Jambi dan Jakarta.

Salah satu peran Abunjani dalam menunjang perjuangan di masanya adalah membentuk Badan Keuangan Perjuangan yang memobilisasi pedagang karet ke Singapura dengan menyisihkan 10% keuntungan untuk perjuangan. Usaha tersebut selain dapat membantu perjuangan Pemerintah Pusat, sewa-beli Pesawat Catalina (RI 05) sebagai pesawat penghubung ke Sumatera Barat maupun Yogyakarta dalam jaringan pemerintahan, juga memasok perlengkapan dan perbekalan pasukan dengan sistem barter komoditi lada, vanili, karet, dan lain-lain.

Peran yang perlu dicatat kepemimpinan Letnan Kolonel Abunjani adalah memindahkan pusat pemerintahan dan pertahanan militer saat serangan Belanda pada 29 Desember 1948. Bersama dengan Rd. Inu Kertapati dan M. Kamil mengungsi ke pedalaman, tetapi terhenti di Sengeti. Rd. Inu Kertapati kembali ke Jambi untuk menenangkan keluarga dan masyarakat kota Jambi oleh bombar dir pesawat dan serangan tentara Belanda melalui Kenali Asam dan Palmerah. Pada 1 Januari 1949 terbitlah surat kuasa Residen Jambi Rd. Inu Kertapati kepada M. Kamil, Bupati Jambi Hilir untuk meneruskan Pemerintahan Darurat Keresidenan Jambi. Dalam rapat antara unsur pemerintah dan militer di Tebo menghasilkan keputusan bahwa H. Baksan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Jambi Ulu sebagai Residen Pemerintah Darurat Keresidenan Jambi dan Pusat Komando Militer dipindahkan ke Bangko. Walaupun mengalami berbagai gempuran, perjuangan dan pemerintahan darurat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Deli Serdang (Sumatra Utara)

Di zaman Jepang. Serdang dikenal sebagai lumbung padi di mana tanah belukar dan tanah perkebunan dijadikan areaal pertanian. Untuk mengurus bahan makanan rakyat baginda menumbuhkanlah Kantor Distribusi Bahan Makanan yang mengontrol hasil padi rakyat dan kilang padi di seluruh Serdang. Oleh sebab itu wilayah Serdang termasuk yang paling aman dan tidak teraapat pemberontakan rakyat petani seperti halnya pemberontakan petan; Kayo 'Guro-guro Aroan" di bulan Juni 1942 di Kerajaan Deli (Pancur Batu) dan Bulilir di Kerajaan Langkat.'

Sultan juga menganjurkan beberapa kerabat dan keluarga Orang Besarnya untuk mengikuti pendidikan kemiliteran Jepang, yang dirasa perlu di masa depan kelak. Tetapi meskipun di masa mudanya memandang kepada kemajuan Jepang, tidaklah berarti baginda bersimpati kepada penjajahan militerisme Jepang. Di dalam upacara resmi tidak pernah baginda mau tunduk ke arah timur (Tenno Heika). dan dengan alasan sudah tua dan sakit-sakitan beliau duduk saja di kursi. Memang pada akhir masa Jepang itu Sultan sudah berusia lebih 83 tahun sehingga praktis pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Putera Mahkota Rajih Anwar. Saat itu, Tengku Yafizham dan Serdang terpilih menjadi Ketua Umum "Persatoean Oelama Kerajaan-kerajaan Soematera Timoer", sedang kakaknya Tengku Dhamrah. duduk di dalam "Sumatera Tyo Sangi In".

Dalam kenyataannya Jepang mengadakan politik adu domba yang licin antara golongan kerajaan dengan golongan "pergerakan kemerdekaan" dan antara golongan ulama Syafei dari kerajaan-kerajaan dengan ulama "Mohammadiyah". Di mana saja Jepang memakai kedua golongan ini berdampingan. Kecurigaan dan iri mulai ditimbulkan politik adu domba licin dari Jepang ini antara ke dua belah pihak, yang nantinya bakal membawa akibat fatal di zaman masa pemulaan kemerdekaan itu. Tentara Sekutu sudah merencanakan akan mendarat di Sumatera Utara yang kaya minyak dan hasil perkebunan itu. Mereka akan berhadapan dengan inti Tentara ke-25 Jepang (Divisi Imperial Guards'Divisi Konoe-Daini) yang menjaga tambang-tambang minyak di Sumatera Utara Aceh. Rencana pendaratan itu sudah diputuskan di sekitar Agustus-September 1945. yang oleh Churchill disebut "Operation Culvenn". Jika itu kejadian, tentulah wilayah Aceh-Sumatera Timur akan jadi kancah peperangan yang hebat, karena Jepang menganggap wilayah itu masuk "The nuclear zone of the Empire's plans for the Southern Area"³², di mana wilayah itu akan dijadikan wilayah Jepang asli. Oleh sebab itu pusat latihan kader gerakan di bawah tanah untuk gerilya rakyat menghadapi pendaratan Sekutu kelak, yang diberi nama *TALAPETA* (Taman Latihan Pemuda Tani) dipusatkan di Serdang Hulu yaitu di Gunung Rintih di tahun 194? Namanya terdengar sangat sederhana tetapi ia dibangun dan dipimpin langsung oleh ahli intelejen Jepang yang ditakuti Sekutu. Kapten Inoue Tetsuro.

Kepala dan Tokoka (Polisi Rahasia Jepang), merangkap Sekretaris Gubernur Nakashima dan merangkap Bupati Deli Serdang (sampai Mei 1943). Semua pemuda-pemuda yang terpilih itu dilatih selaku pemimpin dari semua garis front terdepan.

Untuk persiapan. 1 regu "Anglo-Dutch Country Section" (ADCS) dari "Mountbatten' Force 136" telah dibentuk di Colombo awal 1945 dan dipimpin oleh Marinir Belanda Letnan Brondgeest dan didrop di Hulu Besitang (Langkat) Pada saat diumumkannya kekalahan Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia maka mereka lalu muncul dari tempat persembunyiannya dan bergerak ke Medan dan membuka markas Belanda di Hotel De Boer (Hotel DHARMA DELI sekarang). Sementara itu mendarat pula rombongan Mayor Jacob di Medan yang diikuti oleh kedatangan Letnan Turk Westerling tanggal 14 September 1945 yang lalu membentuk group bersenjata dari kalangan orang-orang Indo. Menado dan Ambon ex-KNTL. dan bermarkas di Jalan Bali (Pension Wilhelmina)

Proklamasi 17 Agustus 1945 pada awalnya kurang ditanggapi serius di Medan. Masyarakat masih kebingungan dan hanya mendengar desas-desus saja di samping berita bahwa tentara Sekutu akan mendarat. Dr. Tengku Mansur. Ketua "Shu Sangi Kai" (DPR Sumatra Timur di masa Jepang) pada tanggal 25 Agustus mengundang beberapa tokoh-tokoh masyarakat di rumahnya, antara lain Karim MS dan Mr. Yusuf, dan dikeluarkanlah pengumuman untuk menjaga keamanan dan membentuk panitia diketuai Sultan Langkat dan Dr. Mansur untuk menjelaskan kepada tentara Sekutu kelak mengapa diadakan selama ini kerjasama dengan Jepang. Panitia inilah kemudian didesas-desuskan oleh golongan kiri sebagai "COMITE VAN ONTVANGST" (Panitia Penyambut) kedatangan Belanda yang bertugas akan menangkapi orang-orang pergerakan kemerdekaan-*. Desas-desus inilah kemudian dijadikan seolah-olah fakta dan lalu dijadikan bukti tunggal untuk membenarkan dicetuskannya "Revolusi Sosial" terhadap Swapraja-swapraja pribumi di Sumatera Timur pada bulan Maret 1946.

BAB IV

DAMPAK REVOLUSI KEMERDEKAAN DI SUMATERA

Secara umum dampak revolusi kemerdekaan di Sumatera dan di Jawa tidak jauh berbeda. Dua fenomena historis yang tampak jelas adalah : Pertama, terjadinya peningkatan aktivitas politik di kalangan elit, baik elit nasional ataupun elit lokal yang bertujuan untuk konsolidasi. Kedua, terjadinya revolusi sosial.

A. Peningkatan Aktivitas Elit Politik di Sumatera

1. Gagasan Penggabungan Jawa-Sumatera

Pengertian konsolidasi Jawa-Sumatera dalam garis perjuangan Republik adalah penggabungan Sumatera ke dalam wilayah nasional atau pusat. Jawa dikatakan sebagai pusat karena pusat pemerintahan Republik berada di Jawa, Jakarta (1945) dan Yogyakarta (1946). Sedangkan ketika Sumatera menjadi pusat pemerintahan PDRI (1949) tidak termasuk di dalam pembahasan di sini. Argumentasi itu cukup mendasar karena inti pertentangan Indonesia-Belanda sesungguhnya terletak pada nasib masa depan Sumatera.

Pada awal abad XX Sumatera oleh Pemerintah Belanda secara geografi-politik telah disatukan dengan Jawa dan pulau-pulau nusantara yang lain. Namun, Sumatera semenjak jaman Jepang dipisahkan dengan Jawa. Oleh karena itu golongan elit politik Sumatera sejak tahun 1943 mempunyai gagasan untuk menggabungkan Sumatera-Jawa secara politis, artinya mereka memiliki sikap teguh untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia yang meliputi seluruh Nusantara. Keinginan itu diutarakan kepada pihak Jepang dalam suatu lawatan para wakil Sumatera ke Jepang. Wakil Sumatera terdiri dari kalangan pamong praja, yakni Tengku Mohammad Hassan dan Nyak Arief (Aceh), Z.A. Sutan Komala Pontas dan R. Patuan Natigor L. Tobing (Tapanuli), Mr. M. Yusuf dan Zainudin (Medan), Mas Syarif (Bangka), Ir. Indra Tyaya (Bengkulu), Demang Abdurrozak dan Raden Hanan (Palembang), Hasan Pasaman (Lampung),

Abdul Manan (Jambi), Syamsudin (Riau), dan Datuk Majo Urang dan M. Syafei (Sumatera Barat). Gagasan penggabungan Sumatera – Jawa sulit terwujud karena rombongan delegasi dari Sumatra gagal bertemu delegasi dari Jawa, Sutardjo dan Parada Harahap, lantaran Jepang tidak mengizinkan kedua delegasi bertemu.⁶⁶ Perdana Menteri Jepang (1943) selalu menyebut Sumatera Pulau Harapan saat bertemu dengan pemimpin-pemimpin Sumatera.⁶⁷ Pernyataan itu mengandung makna bahwa Jepang tetap menghendaki pemisahan Sumatera dan Jawa.

Arti pentingnya integrasi Jawa-Sumatera secara politis adalah kedua pulau ini terkandung potensi penting bagi perjuangan kemerdekaan. Nasionalisme yang terbentuk di Sumatera, khususnya di Aceh dan Sumatera Barat, dan di Jawa tidak lagi dapat disanksikan, yakni bukan nasionalisme yang sempit. Sejak Indonesia merdeka, Hatta memiliki gagasan bahwa Sumatera adalah daerah alternatif dan masa depan perjuangan. Demikian pentingnya Sumatera di mata Hatta, sehingga suatu waktu diawal proklamasi ia pernah memperingati pemuda bahwa “Sumatera boleh jadi lautan api dan tenggelam ke dasar lautan, asal jangan jatuh ke tangan Belanda.”⁶⁸

Integrasi Jawa-Sumatera dalam unit geografi-politik RI terwujud kembali pada awal kemerdekaan. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Sumatera menjadi sebuah propinsi Indonesia. Kenyataan lain adalah pada bulan Juni 1946 Sumatera akan melaksanakan bentuk tingkat-tingkat administrasi pemerintah seperti sistem di Jawa. Sekalipun suatu administrasi terpusat baru menjadi realitas beberapa tahun kemudian.

Dalam perkembangan politik pada tahun 1947, pihak Belanda secara sepihak mendirikan Negara Sumatera Timur melalui politik federalnya. Tiga bulan kemudian (Februari 1948) Belanda mendirikan

⁶⁶ Abi Hasan Said (1992). Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah. Yogyakarta : Yayasan Krama Yudha, h. 46-47.

⁶⁷ Velde., h.47

⁶⁸ Kutipan itu diambil oleh Mestika Sed dari Darsyaf Rahman dalam Moh. Rasyid. Rasyid 70 tahun (Jakarta : Mutiara Offset, 1981), lihat Mestika Zed hlm. 39

Negara Sumatera Selatan. Di dalam Negara-negara federal terdapat perasaan pro-republik yang tidak begitu besar di kalangan elit politik dan dukungan yang tidak begitu besar dikalangan rakyat terhadap federalisme⁶⁹.Maka Belanda mengambil cara penyelesaian masalah Indonesia lewat kekuatan militer.

2. Konsolidasi Pemerintahan

Setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, maka perlengkapan sebuah negara merdeka pun diperlukan. Hanya sehari setelah proklamasi, UUD yang disusun sebelumnya oleh PPKI disahkan oleh PPKI. Lembaga eksekutif dipilih dan Sukarno-Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Golongan elit politik menyadari bahwa hanya Sukarno-Hatta lah yang dapat berurusan dengan pihak Jepang yang masih berkuasa di Indonesia. Bukan tidak ada yang tidak setuju, seorang wakil dari Sumatera , Dr. M. Amir, menuturkan kepada Dr. Ratulangi sebelum kongres PPKI untuk menyusun negara Indonesia, sebagai berikut :

“.....bahwa ia tidak tertarik kepada kepemimpinan Sukarno, karena pasti akan ditolak oleh Belanda. Kepemimpinan Hosein Djayadiningrat atau Moelia menurut pendapatnya, lebih bisa di terima”⁷⁰

Kemudian PPKI yang sebelumnya bertindak sebagai penasehat presiden dibubarkan dan diganti KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 22 Agustus 1945. KNIP di ketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. KNIP selanjutnya menunjuk seorang anggotanya yang berasal dari setiap daerah untuk mendirikan KNI di daerahnya (KNID). Tugas KNID adalah membantu gubernur yang diangkat oleh presiden pada tanggal 19 Agustus 1945. Ketika itu wilayah Indonesia yang meliputi bekas wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi delapan propinsi, yakni

⁶⁹ M.C. Riclefs. Hlm. 341

⁷⁰ Van de Velde., hlm. 147

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

Gubernur pertama Sumatera ialah Mr. Tengku Muhammad Hassan, ia ditunjuk oleh presiden Sukarno bersamaan dengan penetapan propinsi-propinsi di Indonesia. Pembagian wilayah propinsi itu diputuskan dalam sidang PPKI di Jakarta (19-8-1945). Delegasi Sumatera mempunyai harapan agar diberikan otonomi dalam urusan-urusan dalam dan luar negeri. Mr. tengku Muhammad Hassan mendesak supaya kabinet pertama Republik yang terbentuk benar-benar kabinet Indonesia, bukan kabinet Jawa.⁷¹Tampaknya usul itu diterima sidang sehingga kabinet pertama Republik terdapat dua orang dari Sumatera, yakni Amir Syarifuddin sebagai Menteri Penerangan dan Dr. M. Amir sebagai Menteri Negara tanpa portofolio.

Sebelum ketiga pemimpin Sumatera kembali ke Sumatera, dalam suatu jamuan makan di rumah Maeda telah diperingatkan oleh Sukarno agar tidak membentuk negara sendiri. Sumatera harus tetap merupakan sebuah propinsi.

Setibanya di Sumatera mereka mengunjungi kota-kota besar di Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah untuk melakukan konsolidasi dengan pemimpin-pemimpin politik setempat. Mereka memberi pengarahan dan keterangan hasil kongres di Jakarta dengan maksud supaya memberikan dukungan kepada Republik, adapun garis-garis politik RI adalah :

1. Adanya Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak ada sangkut pautnya dengan Jepang.
2. UUDS telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
3. Dokumen-dokumen lainnya mengenai KNI, Penjaga Keamanan Rakyat dan PNI.
4. Petunjuk-petunjuk lainnya mengenai pengambil-alihan kekuasaan dari Jepang.

⁷¹ Ibid, hlm. 149 : Lihat juga Pelzer, hlm. 158

Para pemimpin itu juga mendesak agar membentuk panitia untuk seluruh Sumatera (KNI Sumatera). KNI Sumatera dapat dibentuk di Bukit Tinggi yang dipimpin Dr. Gindo Siregar. Pembentukan KNI itu diikuti oleh para tokoh nasionalis di tingkat karesidenan sampai wilayah yang terkecil, misal nagari (Minangkabau), marga (Palembang), dan sebagainya.

Pada hakekatnya KNI adalah penjelmaan dari cita-cita demokrasi dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Konsolidasi pada tahap awal oleh pemerintah pusat sejak kemerdekaan adalah menyatukan seluruh golongan sosial yang beragam latar belakangnya, ideologi-politik, agama, kedudukan sosial dan rasial. Tujuan utama konsolidasi itu sudah tentu untuk mempertahankan kemerdekaan. Kekuatan sosial yang terintegrasi dalam wadah negara RI merupakan faktor pendukung revolusi yang amat penting saat itu. Seluruh kekuatan sosial dalam segala lapisan masyarakat diinstruksikan oleh pemerintah pusat agar mempunyai wakil-wakilnya di dalam Komite Nasional, sehingga KNI betul-betul menjadi perwakilan rakyat daerah. Demi keselamatan perjuangan wakil-wakil rakyat bebas mengajukan usul-usul kepada pemerintah.

KNI di tingkat daerah juga telah dibentuk (September 1945) dari tingkat propinsi sampai pada tingkat daerah terkecil. Pada akhir bulan terjadi sedikit perubahan, yakni berdasarkan instruksi Gubernur Mr. Tengku Mohammad Hassan boleh merangkap ketua KNI Daerah. Sebelumnya di tingkat Karesidenan, seorang Residen sekaligus Ketua KNID.

Sementara itu susunan lembaga-lembaga negara selesai dibuat pada akhir September 1945, antara lain Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Para Gubernur. Pemerintah pusat juga menetapkan semua pegawai pemerintah pusat sebelumnya menjadi pegawai RI. Keputusan pemerintah pusat di Jakarta yang belum dapat dilaksanakan ialah pembentukan partai tunggal negara, yakni PNI (Partai Nasional Indonesia), yang sedianya akan diketuai Dr. A.K. Gani. Pembentukan PNI ditangguhkan karena adanya

pertentangan internal yang berbeda kepentingan, praktis hanya KNIP dan KNID – KNID lah yang merupakan organisasi politik utama.

Dengan munculnya maklumat pemerintah tentang berdirinya partai- partai politik pada tanggal 3 November 1945 maka perbedaan aliran dalam masyarakat diharapkan dapat dihapuskan. Pemerintah memberi kesempatan berdirinya partai-partai politik agar partai-partai politik dapat memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Melalui partai politik semua faham dalam masyarakat diharapkan dapat dikoordinasikan dengan teratur.

Sebenarnya pemimpin-pemimpin itu tidak berhasil menemui tokoh-tokoh politik Sumatera Barat, namun sebelum melanjutkan perjalanan telah meninggalkan dokumen hasil kongres di Jakarta.⁷²

Di Medan, Dr. M Amir dan Mr. T. Muh Hassan membentuk KNI Sumatera Timur. Pembentukan KNI itu mendapat dukungan dari golongan pemuda, tetapi para Sultan (elit tradisional) dan pendukung-pendukungnya menentang. Golongan elit tradisional menolak pembentukan KNI karena khawatir hari depan politiknya sendiri.⁷³

Sebelum Januari 1946 apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat Pematang Siantar tidak banyak.⁷⁴ Hal ini disebabkan sejak pendudukan kembali Belanda di Sumatera Utara, kaum elit politik hijrah ke Sumatera Barat. Selain itu pecah revolusi sosial di daerah-daerah di Utara dan konflik-konflik bersenjata antara tentara Belanda dan kaum republiken. Praktis pemerintah pusat Sumatera belum dapat memimpin daerah-daerah.

Diharapkan dari sinilah pedoman-pedoman pemerintah untuk seluruh Sumatera dikeluarkan. Pedoman itu tercantum dalam maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1946, yang menjelaskan bahwa Sumatera sebagai satu propinsi dari Republik Indonesia haluan politiknya Tidaklah terlepas dari politik yang dijalankan pemerintah pusat RI. Segala perundingan politik dalam tingkat yang berkenan dengan status Indonesia

⁷² Mestika Zed., loc,cit

⁷³ Pelzer., op.cit., hlm. 159

⁷⁴ Ibid

dilakukan di Jawa oleh kabinet. Rakyat Sumatera berdiri teguh di belakang Presiden dan Kabinet Syahrir, menegakkan kemerdekaan dan mempertahankan Republik dengan sekuat-kuatnya.⁷⁵ Dengan demikian konsolidasi yang bersifat hubungan instruksional antara pusat (Jawa) dan daerah (Sumatera) baru dimulai sejak bulan Januari 1946. Tidak kalah pentingnyakonsolidasi di Sumatera pada masa sebelumnya selama lebih empat bulan. Oleh karena itu politisi daerah Sumatera sangat menonjol aktivitasnya selama bulan-bulan awal itu. Lebih-lebih waktu itu adalah “masa menunggu” kehadiran sekutu yang berkewajiban melucuti senjata Jepang dan melepaskan tawanan tentara Belanda, maka konsolidasi sangat menentukan bagi terwujudnya kesatuan nasional.

Konsolidasi diawal revolusi begitu jelas terlihat kepercayaan Sukarno kepada pemimpin-pemimpin daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Telah disadari oleh kaum nasionalis bahwa komunikasi dan konsultasi antara Jawa dan luar Jawa sangat sulit. Demikian halnya hubungan antar daerah di Sumatera yang oleh Jepang memang dibuat terpisah-pisah.⁷⁶ sehingga dikhawatirkan semangat kemerdekaan yang tinggal di kalangan golongan pemuda di daerah-daerah akan berakibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam aksi-aksinya. Gerakan pemuda yang tidak terkoordinasi justru akan merugikan revolusi, bentrokan dengantentara Jepang, perampasan harta orang Cina dan lain-lain merebak di daerah-daerah. Tentara Jepang belum bersedia meninggalkan kantor-kantor maka pengambilalihan gedung-gedung perkantoran sering menimbulkan konflik. Suasana begitu revolusioner, seperti di Bukit Tinggi, Padang, ketika masa rakyat menaiki Bendera Merah Putih di Jam Gadang, jika tidak terkoordinasi akan menyebabkan anarki.

3. Konsolidasi Kekuatan Sosial Politik

⁷⁵ BPSIM., loc.cit., hlm. 225-227

⁷⁶ Mestika Zed., op.cit.

Masa antara pertengahan Agustus 1945 sampai 1946 merupakan “masa menunggu” dan sekaligus sebagai “Periode bersiap” bagi bangsa Indonesia, karena Indonesia sudah merdeka tetapi sebenarnya Jepang masih berkuasa sampai digantikan oleh sekutu yang menang perang. Selama menunggu kedatangan pihak sekutu, golongan elit politik begitu sibuk melakukan kegiatan melaksanakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bilamana sekutu akan menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang. Konsolidasi disegala segi mempunyai arti penting bagi eksistensi negara Indonesia merdeka.

Kaum elit politik Sumatera seja mendengar berita proklamasi Kemerdekaan sudah melakukan konsolidasi dimasing-masing daerahnya. Para pemimpin lokal berupaya menghimpun kekuatan dari golongan pemuda. Tentara Jepang tetap berusaha menjaga keutuhan kekuasaannya untuk dilaporkan dan diserahkan kepada pihak Sekutu. Sepenuhnya Jepang belum mengundurkan diri dari kekuasaannya. Sememntara bangsa Indonesia sudah harus memiliki dan memasang simbol-simbol negara merdeka. Melalui rapat-rapat pada umumnya instruksi ke dalam badan-badan perjuangan yang disampaikan kepada golongan pemuda mengacu kepada arahan dari pemerintah pusat yang dibawa oleh delegasi Sumatera dari Jakarta. Dengan demikian jaringan konsolidasi Jawa-Sumatera dan daerah-daerah telah ada dalam bentuknya yang sederhana.

Untuk mengkaji masalah konsolidasi kekuatan sosial dan politik sudah tentu diperlukan pemahaman tentang golongan-golongan sosial dan politik yang terdapat di Sumatera pada waktu itu. Dalam bagian terdahulu telah diuraikan adanya golongan-golongan sosial yang tampil sebagai pendukung revolusi dan yang kontra revolusi. Keduanya tidak mudah digabungkan karena berbeda pandangan politik dan latar belakang sosial ekonomi serta sejarahnya. Golongan elit politik bersama kaum mudanyadi Sumatera mungkin dapat dikatakan gagal dalam proses penyatuan secara “damai”. Dengan demikian konsolidasi melalui cara kekerasan yang terjadi, sehingga dampak penyatuan itu antara lain pecahnya revolusi

sosial. Tentang dampak konsolidasi itu akan dibahas tersendiri dibagian terakhir penelitian ini.

Golongan sosial ataupun kelompok-kelompok sosial pendukung revolusi memang banyak jumlahnya. Dapat ditarik perbedaan-perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan diplomasi dan bersenjata, antara golongan kiri dan kanan, antara golongan tua dan muda, antara golongan Islam dan sekuler, antara golongan pro dan kontra revolusi sosial dan sebagainya. Penelitian-penelitian akademis tentang revolusi nasional berusaha untuk mendapat semacam struktur mengenai masa yang pada dasarnya kacau balau. Tidak satupun pembagian dasar diantara bangsa Indonesia tersebut telah terpecahkan diawal revolusi kecuali sepanjang ada kesempatan tentang kemerdekaan sebagai tujuan utama.⁷⁷ Kemerdekaan menjadi ideologi politik nasional dan “sama rasa sama rata” merupakan ideologi ekonomi yang berkembang di daerah-daerah. Dalam kerangka yang terbatas semua perbedaan untuk sementara waktu ditinggalkan. Hal ini tidak terlepas dari peranan golongan elit politik dalam aktivitas konsolidasi sebelum dan saat revolusi dimulai.

Pemupukan kesadaran nasional secara terus menerus dilakukan oleh elit politik khususnya menjelang revolusi hingga pecahnya revolusi. Maka tujuan para pemimpin revolusi adalah melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan itu. Bantuan keras terjadi dengan pihak Belanda yang bertujuan menghancurkan sebuah negara baru pimpinan kaum elit yang bekerjasama dengan Jepang. Pihak Belanda ingin memulihkan rezim kolonial yang telah lama dibangunnya.

Reaksi kaum elit politik di Sumatera terhadap kehadiran Sekutu yang diboncengi oleh Belanda dan mendarat di Sumatera adalah meningkatkan aktivitas konsolidasi melalui propaganda dan intimidasi kepada kelompok-kelompok elit dan masyarakat daerah yang dipandang pro Belanda. Maka golongan elit politik terutama mengarahkan konsolidasinya kepada golongan masyarakat yang pro Belanda.

⁷⁷ M.C. Ricklefs., loc.cit.

Sesungguhnya Hatta sudah menaruh perhatian terhadap suku-suku di luar Jawa terutama Sumatera, sebelum Belanda datang. Apa yang dipikirkan Hatta mengenai hal itu adalah kekhawatiran terhadap orang-orang yang dulu menyenangi dan disenangi Belanda akan mendukung Belanda.⁷⁸

Kegagalan Hatta mengunjungi daerah-daerah di Sumatera karena kesibukan urusan di pusat menyebabkan konsolidasi di tingkat daerah mengalami hambatan sehingga kedudukan Belanda makin lama makin bertambah kuat. Catatan Velde menunjukkan bahwa orang Toba menginginkan Belanda berkuasa kembali, berpuluh-puluh pemuka Aceh, Sultan dan pemuka adat di Sumatera Timur, sebagian kaum intelektual, penduduk Bangka, mereka mau diajak kerjasama dengan Belanda.⁷⁹

Aktivitas pengintegrasian kekuatan sosial dan politik dilakukan dengan bermacam-macam cara, antara lain kunjungan pemimpin – pemimpin ke daerah-daerah, pertemuan-pertemuan dan propaganda. Faktor kesulitan transportasi menyebabkan intensitas kunjungan ke daerah-daerah sangat kecil. Namun pertemuan para pemimpin walaupun untuk seluruh Sumatera sangat kurang, tetapi di tingkat daerah-daerah sangat efektif. Konsolidasi yang paling banyak ialah dilakukan oleh pemuda aktivis (kader elit politik/elit politik kelas III) dengan propaganda-propaganda melalui surat kabar berbahasa melayu, pemancar radio dan prasarana lain.

Adapun isi propaganda berupa hasutan-hasutan, teror, dan kebencian terhadap Belanda. Pihak Republik menguasai propaganda, sedangkan Belanda tidak memiliki surat kabar dan pemancar radio. Sementara pihak Inggris menganggap sepi propaganda Republik Indonesia tersebut dan tidak mau mencampuri urusan-urusan politik. Begitu giat propaganda dijalankan bahkan tiap hari selalu ada saja usaha meyakinkan massa secara intensif, bahwa “orang Belanda itu iblis berbentuk manusia, selama 350 tahun Belanda tidak berbuat apa-apa di Indonesia, kecuali

⁷⁸ Mestika Zed., loc.cit.,

⁷⁹ Van de Velde., op.cit., hlm.138,140,143 dan 151

merampok dan membunuh”. Pihak Belanda menganggap para pemimpin itu cukup baik dapat diajak kerjasama, namun individu-individu sering bertindak kurang baik, apalagi militernya.⁸⁰

Surat kabar berbahasa melayu dan radio benar-benar merupakan alat yang efektif. Melalui media komunikasi itu elit politik melancarkan intimidasi yang membuat kelompok kecil intelektual dan pemimpin-pemimpin moderat Sumatera yang oleh Belanda bisa diharapkan menjadi pendukungnya “tidak berani berbuat apa-apa”. Mereka benar-benar takut karena hasutan dan teror, sebagaimana termuat didalam surat kabar-surat kabar, misalnya : “bunuh kutu-kutu itu, culik perempuan-perempuan Belanda”, “merdeka 100%”, “lebih baik mandi darah daripada dijajah” dan sebagainya.

Pengaruh Tan Malaka dan badan perjuangannya (persatuan perjuangan) di Sumatera Timur sangat besar, lebih besar dari elit politik pusat. Disana kaum Republik dijiwai oleh semboyan “merdeka 100%”, golongan ini berhadap dengan golongan elit tradisional atau pemerintah kerajaan-kerajaan Melayu, Batak Simalungun dan Batak Karo. Kaum Republik menuntut “daulat rakyat”. Kenyataan semboyan seperti itu meluas ke daerah Sumatera yang lain.

Propaganda Sukarno telah membawa rakyat ke puncak semangat. Dengan gaya oratornya yang khas dan cerdas, ia mampu membalikan arus dukungan yang besar kepada Republik sehingga pengaruh politik Belanda tidak dapat berkembang. Propaganda oleh golongan elit telah membuat kebencian kepada orang-orang Belanda. Komunisme, agama dan perbedaan ras dijadikan isu pokok dalam pengintegrasian seluruh kekuatan social dan politik. Wajarlah jika Velde menilai propaganda Sukarno itu memakai cara khas Nazi dan Jepang.⁸¹ Pihak Belanda merasa benar-benar terjepit dan sulit keluar dari situasi seperti itu, sebagaimana terjadi di

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Ibid

Medan, Padang dan Palembang. Hanya ada satu jalan yang dapat dilewati Belanda, yaitu perundingan dengan mengakui Republik secara de facto.

Aktivitas elit politik sejak Indonesia merdeka hingga agresi Belanda I (1947) sesungguhnya telah mencapai suatu kesatuan dalam politik untuk menghadapi Belanda. Pada umumnya para pemimpin Belanda tidak memahami hal itu. Keadaan yang sebenarnya di seluruh Indonesia sebagaimana diamati oleh J.J. Van de Valde dapat diketahui dalam kutipan berikut ini:

“kukira, inilah inti problem di seluruh Indonesia : semua perbedaan antara satu sama yang lain, dilupakan dan dipadamkan, selama melawan kolonialisme”.⁸²

Situasi seperti itu terwujud berkat kesediaan dan kemampuan elit politik, baik lokal maupun nasional. Peranan Hatta dan Sukarno dalam konsolidasi politik begitu besar. Kurang lebih dua tahun sejak kemerdekaan Mohammad Hatta baru bisa mengunjungi Sumatera. Alasan utama ialah berkaitan meletusnya revolusi sosial di Aceh dan Sumatera Timur. Revolusi sosial di Aceh yang bercorak Islam tidak begitu mengawatirkan Hatta, tetapi di Sumatera Timur berhubungan langsung dengan unsur-unsur Marxisme dalam kelompok Persatuan Perjuangan (PP) pimpinan Tan Malaka. Di daerah itu, juga di Minangkabau, prestise Tan Malaka sangat tinggi, kelompok PP berjuang melalui garis keras dan menentang perundingan-perundingan dengan Belanda. Disamping itu Hatta juga memandang adanya bahaya di Sumatera Barat, yaitu pecahnya pemberontakan pada bulan Maret 1947 yang diarahkan pada golongan militer dan para administrator daerah itu. Peristiwa itu melibatkan mantan laskar Masyumi dan sebagian pemimpin PNI baru, partainya Hatta sebelum perang. Perpecahan di Sumatera Barat turut mendorong Hatta menyempatkan berkunjung ke Sumatera,⁸³ untuk mencegah meluasnya konflik politik internal.

⁸² J.J. Van de Velde., op.cit. hlm. 216

⁸³ Mestika Zed., op.cit. hlm. 39

Tahun 1946 dan tahun 1947 di Sumatera memang terjadi yang hebat sejalan dengan perkembangan politik nasional. Pada saat perundingan Perdana Menteri Syahrir Van Mook berjalan baik maka di daerah-daerah di Sumatera pun tenang, tanpa teror dan agitasi. Beberapa daerah yang sering mengikuti jalur politik di Jawa adalah Medan, Padang, Palembang dan daerah yang dikuasai Republik lainnya. Daerah-daerah itu akan bergolak apabila pihak Belanda melakukan kecurangan untuk tujuan kolonialisme. Hal ini telah didasari oleh J.J. Van Velde yang kerap kali mendengar dari elit politik Indonesia, seperti dalam pertemuannya dengan

AK. Gani bersama orang-orang Inggris. Begitu pula ia mendengar dari Dr. Amir⁸⁴ sebagai berikut :

“orang-orang Indonesia mengatakan bahwa mereka bersikap bersahabat terhadap kita, asal kita membebaskan dan tidak menindas mereka. Mereka tidak anti Belanda, tetapi kolonialisme”.⁸⁵

Identitas nasional dapat pula diketahui dari catatan J.J. Van de Velde berdasarkan pengamatan ketika kunjungan Sukarno pada tanggal 4-6 Juni 1948, ia menyatakan bahwa Sukarno dielu-elukan seperti raja di bukit tinggi, Tapanuli dan Aceh. Sukarno Jelas merupakan lambang hasrat kemerdekaan.⁸⁶

Dalam perkembangan politik di Indonesia, pihak Belanda tidak mengetahui benar keinginan orang-orang Sumatera. Politik federal yang diterapkan untuk memecah-mecah wilayah nusantara menjadi 15 negara federal dipandang sebagai permulaan keberhasilan. Mula-mula Belanda berhasil mendirikan Negara Sumatera Timur, kemudian disusul Sumatera Selatan pada tahun 1947 dan direncanakan berikutnya Negara Sumatera Utara. Akan tetapi sebenarnya di dalam Negara-negara federal

⁸⁴ Dr. Amir ialah seorang elit politik yang moderat, ia pernah jadi wakil Sumatera dalam kongres PPKI tahun 1945, dan pernah minta perlindungan kepada Belanda dan Inggris ketika pecah revolusi sosial di Sumatera.

⁸⁵ Velde., op.cit. 258

⁸⁶ Ibid., hlm. 216

itu hanya ada sedikit yang pro Belanda. Di Sumatera Timur, kelompok minoritas pro Belanda mempunyai kepentingan politik karena khawatir adanya infiltrasi dari orang-orang Minangkabau yang lebih maju dalam intelektualitas. Disana orang Jawa dan Batak dianggap kekuatan yang mengancam kelompok kecil tersebut. Oleh karena itu politik mereka ialah mencari perlindungan kepada Belanda.

Di daerah-daerah lain di Sumatera harapan memperoleh otonomi tidak dapat disamakan anti Republik, bahkan di Sumatera Timur dan Sumatera Selatan sekalipun. Di Tapanuli, ketidakmampuan Belanda melindungi penduduk dari tekanan kaum republiken membuat kepercayaan kepada Belanda hilang. Sementara di Sumatera Barat yang memiliki kekuatan nasionalis besar telah mampu memindahkan prasarana perjuangan untuk melawan Belanda. Termasuk pasar-pasar dapat didirikan dipedalaman. Sementara Aceh yang memiliki ideologi Islam dalam setiap perlawanan dengan Belanda sangat sulit diharapkan.

Dengan demikian pengertian otonomi bukanlah secara luas. Daerah-daerah di Sumatera hanya menginginkan otonomi dalam urusan wilayahnya dan bebas mengadakan hubungan dengan luar. Hal ini telah dituntutkan kepada pemerintah pusat RI pada awal kemerdekaan.

B. Revolusi Sosial di Sumatera

“Revolusi dalam Revolusi” merupakan istilah yang sering dipakai oleh sejarawan untuk menunjuk revolusi sosial di Indonesia. Revolusi sosial mulai dalam bulan November 1945 yang meningkat dengan cepat justru sejak pasukan-pasukan Sekutu. Kebanyakan revolusi sosial diakibatkan oleh persaingan antara elit-elit alternatif, kelompok-kelompok kesukuan dan kemasyarakatan atau generasi-generasi. Lagi pula biasanya hanya mempunyai arti penting untuk sementara waktu, kecuali di beberapa wilayah di Sumatera.⁸⁷ Seberapa penting revolusi sosial di Sumatera bagi republik dan

⁸⁷ M.C. Ricklefs., *op.cit.*, hlm. 328

apakah ada kaitannya dengan konsolidasi? Di bawah ini akan dicoba untuk menjelaskan masalah itu.

Suatu kenyataan bahwa revolusi sosial di Sumatera terpisah dari politik yang digariskan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian terlepas pula dari kebijakan pemerintah daerah Sumatera, karena garis politik mengikuti Jawa. Sejak semula pemerintah pusat memutuskan penyelesaian masalah dengan cara damai atau diplomasi. Sedangkan revolusi sosial berkaitan dengan kekerasan, perampasan, perampokan, pembunuhan, pembakaran dan pengrusakan-pengrusakan. Para pemimpin pusat tidak banyak berpengaruh terhadap revolusi sosial di Sumatera dan Jawa. Oleh karena revolusi sosial itu tidak dirumuskan oleh elit politik maka meletus secara spontan dan memiliki sifat khusus. Di Sumatera Utara, sifat itu diperlihatkan pada cita-cita modernisasi tanpa melewati “bangsa barat”. Di Batak karo telah terjadi penolakan terhadap lembaga pendidikan yang disodorkan oleh Belanda. Masyarakat dataran tinggi Karo, dan Aceh, beranggapan bahwa kolonialisme identik dengan penaklukan, penindasan dan bencana. Revolusi sosial di sana telah melibatkan golongan petani, suatu konsekuensi logis yang mengikutinya.

Di Aceh, roda revolusi sosial digulirkan oleh PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh)⁸⁸ dan melindas golongan bangsawan birokrasi (Uleebalang) pimpinan T. Daud Cumbok di Pidie. Di bawah kendali kaum ulama pimpinan Daud Beureu'eh, revolusi itu telah menggagalkan dan menyingkirkan 107 bangsawan yang ingin mempertahankan kewibawaannya dan mengejek Republik beserta kaum pemudanya.⁸⁹ Antara bulan Desember 1945 dan Maret 1946 para Uleebalang terkemuka beserta keluarganya dijebloskan ke dalam penjara atau dibunuh. Pertentangan sosial itu secara historis sudah berakar sejak Perang Aceh, khususnya berkaitan dengan masalah pengurusan tanah, peradilan dan pemerintahan. Pada masa pendudukan Jepang (1942) konflik itu dihentikan oleh Jepang dan kekuasaan bergeser dari Uleebalang kepada ulama. Selama Revolusi Nasional, Aceh dibiarkan tak disentuh Belanda

⁸⁸ PUSA sebagai pusat gerakan, dan anggota partai – partai terikat dalam disiplin yang digariskan PUSA, seperti anggota Pasindo, PNI, Mujahidin dan sebagainya.

⁸⁹ Anton Lucas dalam Colin Wild dan Peter Carey (ed.), *op.cit.* hlm. 160.

sehingga menjadi daerah paling stabil di Indonesia. Sebelum revolusi sosial, banyak Uleebalang yang mengharapkan kembalinya Belanda, tetapi tak kembali, maka tidak terlindungi lagi. Suatu akibat revolusi sosial di Aceh ialah terjadi perubahan permanen di tingkat elit.⁹⁰

Dua di antara revolusi sosial di Sumatra yang penting kecuali Aceh ialah di Sumatera Timur. Peristiwa itu menarik perhatian Hatta secara khusus, yang menyebabkan ia harus berkunjung ke Sumatera. Kunjungan pada tahun 1947 itu merupakan yang pertama kali bagi Hatta sejak kemerdekaan. Revolusi sosial di Aceh yang digerakkan dengan ideologi Islam tidak begitu mencemaskan Hatta, tetapi di Sumatera Timur dipandang membahayakan cita – cita Revolusi Kemerdekaan karena ada unsur Marxisme di dalamnya. Dikhawatirkan strategi Tan Malaka melalui garis keras yang kontra perundingan sejak awal kemerdekaan akan menciptakan militansi yang merugikan Republik. Aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap raja – raja atau sultan – sultan di Sumatera Timur yang dicurigai pro Belanda justru memberi peluang Belanda untuk propaganda bahwa Republik gagal menciptakan keamanan. Sementara masyarakat kalangan bawah merindukan ketentraman seperti yang disinyalir oleh J.J. Van de Velde. Ia juga menyaksikan kekuasaan massa pemuda bersenjata lengkap atau setengah lengkap di daerah – daerah, dan kebanyakan orang menuntut kemerdekaan 100 persen.⁹¹ Ini menunjukkan pengaruh politik Tan Malaka telah meluas di Sumatera, termasuk pula di Sumatera Barat.

Keterkaitan para pemimpin pusat terhadap munculnya revolusi sosial tidak banyak; Sukarno – Hatta tidak menghendaki hal itu terjadi, Sjahrir pun tidak juga banyak berpengaruh karena hanya kalangan terbatas yang mendukungnya. Hanya apabila dibandingkan dengan politisi yang lain, Sjahrir lebih terikat dengan revolusi sosial karena gagasannya yang terlihat pada pamfletnya, yang berjudul “Perjuangan Kita” yang terbit pada Nopember 1945, adalah tentang revolusi sosialis internasional yang berisi soal

⁹⁰ M.C. Ricklefs., *op.cit.*, hlm. 330-331

⁹¹ Ketika itu J.J. Van de Velde sebagai penasehat pemerintah urusan politik untuk Sumatera. Lihat Velde., *op.cit.*, hlm. 327

demokrasi, anti bangsawan dan anti fasis.⁹² Hal ini sebenarnya bumerang bagi Sjahrir tatkala menjabat sebagai Perdana Menteri.

Peristiwa revolusi sosial di Sumatera dianggap merupakan ancaman serius bagi republik setelah ternyata melebar menjadi pertentangan etnis antara Batak Karo dan Mandailing yang berlatar belakang perbedaan agama, yakni Islam dan Kristen. Konflik ini jelas menjadi ancaman integritas perjuangan. Ada kecenderungan perebutan daerah perjuangan di antara kelompok – kelompok pejuang, di samping juga meluasnya konflik dengan tentara Belanda. Sementara itu, Mr. TM. Hassan, Gubernur Sumatera, yang hanya memiliki kekuasaan terbatas di luar Sumatera Utara, nyaris tak memiliki wewenang yang efektif sebagai pemimpin Sumatera.⁹³ Dua kejadian penting, revolusi sosial di Aceh dan Sumatera Timur, ditambah lagi dengan menanjaknya popularitas kepemimpinan A.K. Gani diakui pula di lingkungan orang – orang Belanda, hal ini tampak dalam upaya penyelesaian konflik kaum republiken dengan pasukan Belanda di Medan, seperti kutipan berikut ini :

“ ... Di sanapun ada Komisaris Pemerintah De Boer, juga Jenderal Spoor dan Mr. Wright. Mr Wright mendukung usul yang telah diajukan pada pertemuan pertama, yakni mencoba menarik dr. Gani yang sekarang menjabat Menteri Ekonomi, kembali ke Sumatera untuk bersamaku (Colonel Van de Velde) mempengaruhi pemimpin – pemimpin lokal sehingga memungkinkan diadakan pembicaraan – pembicaraan antara pihak Indonesia dan Belanda mengenai kepentingan – kepentingan lokal. Kalau itu berhasil pertumpahan darah mungkin akan terhindarkan.⁹⁴

Keadaan di Medan memang sangat buruk dalam segala hal; daerah Medan tidak aman dan tertutup, golongan Republiken Aceh dan Batak sudah mengepung kota sejak awal Januari 1946. Massa pemuda menutup saluran air, memutus hubungan dengan daerah – daerah lain dan menghalangi masuknya makanan segar. Penduduk setempat melakukan eksodus besar – besaran menuju Belawan, sekitar 2.000 orang yang terdiri dari orang Belanda, Ambon,

⁹² M.C. Ricklefs., *op.cit.*, hlm. 327

⁹³ Mestika Zed., *loc.cit.*

⁹⁴ Velde., *op.cit.*, hlm. 160

Cina dan India. Kecurigaan terhadap orang Cina begitu besar sehingga seringkali terjadi bentrokan seperti yang terjadi di Bagan Siapi – Api. Sumatera Barat, dan tempat – tempat lain di Sumatera. Revolusi sosial menangkap orang – orang yang menyimpan uang NICA, menyimpan pakaian kebesaran pegawai Belanda dan lambang – lambang yang lain.

Revolusi sosial juga melanda Pulau Samosir, Tapanuli dan Palembang. Kejadian – kejadian di wilayah tersebut sekalipun tidak penting seperti di Aceh dan Sumatera Timur, namun dapat pula digunakan sebagai bahan propaganda Belanda. Bagi Republik, revolusi sosial yang ditujukan kepada golongan pro Belanda jelas meruakan simbol nasionalisme yang tinggi. Semangat kemerdekaan pada waktu itu terbentuk sebagian dari efektifnya. Propaganda yang gencar oleh Elit Politik di berbagai tingkat dan skala. Propaganda politik telah dapat menggantikan kebencian kepada Jepang menjadi kebencian kepada Belanda. Kelompok kecil kaum moderat dan intelektual yang sekiranya dapat diajak kerjasama oleh Belanda tidak dapat berbuat banyak. Kiranya sulit disangkal bahwa konsolidasi kekuatan sosial dan politik tidak berpengaruh terhadap munculnya revolusi sosial di Sumatra.

Konsolidasi kekuatan perjuangan oleh pemerintah RI melalui maklumat Hatta tentang berdirinya partai – partai politik, pada akhirnya telah menimbulkan kelompok – kelompok sosial politik yang saling bertentangan pada tahun 1947. Di daerah Karo sebagai pendukung PNI telah dicoreng oleh Kelompok Harimau Liar. Golongan elit politik Tapanuli (pemimpin pemerintahan dan anggota KNI) ditanggapi oleh Kelompok Pesindo Tapanuli, keadaan ini berbalik ketika pasukan pemerintah berhasil mengatasinya. Perang saudara kecil – kecilan meletus di pelbagai daerah lain dalam bentuk yang berbeda.

Golongan pemuda Persatuan Perjuangan terdiri dari pemuda bersenjata Aceh, Karo, dan Batak Toba, di samping telah menggeser penduduk asli Sidikalang (Batak Dairi) juga menumbangkan kekuasaan resmi Batak Toba. Bentrokan antar suku itu meruntuhkan tradisi otonomi pedesaan.

Berhentinya revolusi sosial di Sumatera Timur ternyata diikuti oleh pertentangan politik di tingkat elit setempat dalam berebut kekuasaan. Persaingan terjadi antara PKI dengan golongan Islam dan PNI, dan berkembang antara pendukung partai bahkan dengan TRI. Kekuatan – kekuatan yang bersaing, yakni Pesindo, Napindo dan TRI. Juga terdorong oleh motivasi ekonomi hasil revolusi sosial. Konflik yang hampir serupa terjadi di pusat pemerintahan di Pematang Siantar, orang – orang Batak Toba menuduh golongan elit politik dan militer menyelewengkan kekayaan. Pengaruh Mr. T.M. Hassan di kalangan tentara Aceh telah mampu mencegah membesarnya konflik.

Pelbagai peristiwa pertentangan sosial dan politik tersebut memberi peluang pihak Belanda untuk mendukung orang – orang yang dirugikan dari revolusi sosial. Dengandemikian revolusi sosial justru merusakkan persatuan dan cita – cita melenyapkan kolonialisme. Keadaan seperti ini berubah menjelang agresi militer Belanda I berkat aktivitas elit politik dan pemimpin militer pusat, khususnya Pidato Panglima Besar Sudirman di Yogyakarta.

BAB V

KESIMPULAN

Zaman revolusi fisik (1945-1950) merupakan suatu zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, hak-hak Indonesia akan kemerdekaan ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa oleh bangsa Indonesia. Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan suatu kisah sentral dalam sejarah Indonesia melainkan merupakan suatu unsur yang kuat di dalam persepsi bangsa Indonesia itu sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk suatu tatanan sosial yang lebih adil akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II.

Revolusi Kemerdekaan Indonesia termasuk di Sumatra sebagai bagian dari Indonesia, berakar pada ide dan konsep-konsep yang lahir pada zaman pergerakan nasional. Revolusi kemerdekaan merupakan landasan atau titik tolak dari revolusi Indonesia. Revolusi memiliki arti penting dalam sejarah Indonesia sehingga mendapatkan perhatian dari berbagai tokoh penting seperti Sukarno, Hatta dan Syahrir. Kata revolusi mempunyai makna yang khas di Indonesia. Kondisi politik, sosial ekonomis, kebudayaan menyebabkan pengertian revolusi erat hubungannya dengan kemerdekaan. Tiada kemerdekaan tanpa revolusi dan tiada revolusi tanpa kemerdekaan.

Secara umum dampak revolusi kemerdekaan di Sumatera dan di Jawa tidak jauh berbeda. Dua fenomena historis yang tampak jelas adalah : Pertama, terjadinya peningkatan aktivitas politik di kalangan elit, baik elit nasional ataupun elit lokal yang bertujuan untuk konsolidasi. Kedua, terjadinya revolusi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Hasan Said. *Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah*. Jakarta : Yayasan Krama Yudha. 1992.

Ajip Rosidi (1976). *Sjafruddin Prawiranegara, Sejarah Sebagai Pedoman Untuk Membangun Masa Depan*. Jakarta : Idayu Press.

Amura (1979). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Minangkabau 1945 – 1950*. Jakarta : Antara

BPSIM (1978) *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Minangkabau 1945 – 1950*. Jakarta : BPSIM.

Pelzer, Karl J. (1978) *Toeang Keboen dan Petani*. Jakarta : Sinar Harapan.

Mestika Sed. (1997). *PDRI. Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Jakarta : Grafiti.

Niel R.V. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta : Pustaka Jaya.

Ricklefs. M.C (1991) *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gama Press.

Vilde (1987). *Surat – Surat dari Sumatera*. Jakarta : Pustaka Azet.

Wild, Colin Pter Carey (ed) (1986). *Gelora Api Revolusi*. Jakarta. Gramedia

